



2018



LAPORAN TAHUNAN
GERAKAN NASIONAL
PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi



2018

LAPORAN TAHUNAN

GERAKAN NASIONAL

PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI

Gugus Tugas Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
BAB II. KEGIATAN GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI	4
2.1. Struktur Organisasi	4
2.2. Kegiatan Advokasi, Kampanye, Sosialisasi, dan Perubahan Perilaku	7
2.3. Kegiatan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor	9
2.4. Kegiatan Pengembangan Program Gizi Spesifik dan Sensitif yang Terbukti Efektif	17
2.5. Kegiatan Pengembangan Pangkalan Data	22
2.6. Kegiatan Lainnya	24
BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	30
3.1. Kesimpulan	30
3.2. Rekomendasi	30
BAB IV. RENCANA KEGIATAN 2019	32
BAB V. PENUTUP	36
Lampiran-Lampiran	

KATA PENGANTAR

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG) telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2012 sebagai bagian dari *Global Scaling Up Nutrition (SUN) Movement*. Gernas-PPG diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 dengan fokus pada perbaikan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1.000-HPK) menggunakan pendekatan multisektor melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat madani, perguruan tinggi dan organisasi profesi, media, dan mitra pembangunan.

Sejak tahun 2015 Gernas-PPG berhasil meningkatkan komitmen dari berbagai pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam upaya perbaikan gizi. Pada akhir tahun 2017, Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi mulai diperkenalkan dan difokuskan pada 100 Kabupaten/Kota dan 1.000 Desa pada tahun 2018. Lokasi fokus pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi akan ditambahkan secara bertahap hingga mencakup seluruh 514 Kabupaten/Kota pada tahun 2024.

Salah satu hasil dari Gernas-PPG adalah penurunan prevalensi stunting pada Baduta dari 32.9% pada tahun 2013 menjadi 29.9% pada tahun 2018, serta pada Balita dari 37.2% pada tahun 2013 menjadi 30.8% pada tahun 2018. Capaian tersebut merupakan keberhasilan kita bersama dalam meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada 1.000 HPK. Dengan demikian, percepatan perbaikan gizi merupakan harapan bersama dalam meningkatkan status gizi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Laporan ini memaparkan kegiatan Gernas-PPG yang dilakukan selama tahun 2017-2018, terutama kegiatan yang bersifat koordinasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Gernas-PPG. Laporan ini disampaikan oleh Ketua Tim Teknis Gernas-PPG kepada Ibu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Ketua Gugus Tugas Gernas-PPG. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu saran dan masukan dari Bapak/Ibu/Saudara/i sangat kami harapkan.

Jakarta, April 2019



Subandi Sardjoko

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
Kementerian PPN/Bappenas

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG) bertujuan untuk percepatan perbaikan gizi masyarakat dengan prioritas pada seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK). Secara khusus gerakan ini bertujuan untuk a) meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan gizi masyarakat; b) meningkatkan kemampuan pengelolaan program gizi, khususnya koordinasi antar sektor untuk mempercepat sasaran perbaikan gizi; dan c) memperkuat implementasi konsep program gizi yang bersifat langsung dan tidak langsung.

Struktur organisasi Gernas-PPG melibatkan tiga belas Kementerian/Lembaga dan terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko-PMK) dan Tim Teknis yang diketuai oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa Kelompok Kerja telah dibentuk untuk mendukung Tim Teknis seperti: Tim Ahli, Kampanye Nasional dan Daerah, Advokasi dan Sosialisasi, Pelatihan, Kemitraan, Perencanaan dan Penganggaran, serta Kajian Faktor Risiko Lingkungan. Sekretariat Gernas-PPG dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan Gernas-PPG.

Kegiatan Gernas Percepatan Perbaikan Gizi

1. Advokasi, Kampanye, Sosialisasi, dan KIE Perubahan Perilaku

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan meliputi: a) penyusunan *policy brief*, penyusunan pedoman dan pelatihan untuk tokoh agama dan kader, kampanye tematik di berbagai media (TV, radio, cetak, dan sosial); b) Pengembangan strategi nasional komunikasi dan perubahan perilaku termasuk komunikasi interpersonal. Strategi ini ditargetkan akan selesai pada kuartar kedua tahun 2019; c) Melaksanakan *media gathering* dengan mengundang rekan-rekan media untuk diberikan pemahaman tentang stunting agar dapat disebarluaskan lebih lanjut kepada masyarakat luas; c) Melaksanakan Rembuk Stunting tingkat nasional dan kabupaten yang diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2018 dan tanggal 21-23 November 2018. Peserta pertemuan tersebut terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, pimpinan perangkat daerah dan beberapa kepala desa dari 34 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota serta perwakilan Kementerian/Lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat madani, media massa. Hasil utama dari Rembuk Stunting baik di tingkat nasional dan kabupaten adalah ditandatanganinya komitmen bersama dalam pencegahan dan penurunan stunting.

2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Dalam rangka penguatan koordinasi lintas sektor telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perbaikan gizi, yaitu: a) Penyusunan dan penetapan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG); b) *SUN Joint Assessment Workshop*; c) Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG); dan d) *The 2018 Indonesia Development Forum*

(IDF) dan 1st SDGs Annual Conference. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG), maka RAN-PG disusun untuk periode waktu 2017-2019 dan telah ditetapkan berdasarkan Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2018. Di tingkat daerah, Pemerintah juga melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Hingga Desember 2018, sebanyak 29 Provinsi yang telah menyelesaikan penyusunan RAD-PG dan 21 provinsi di antaranya telah menetapkannya ke dalam Peraturan Gubernur.

Sebagai bagian dari *SUN Global Movement*, *SUN Joint Assessment* dilaksanakan setiap tahun untuk mengukur komitmen dan pencapaian strategi pelaksanaan *SUN Movement Strategy and Roadmap 2016-2020*. *SUN Joint Assessment* tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 dan dihadiri oleh lebih dari 75 orang peserta yang mewakili dari masing-masing pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga donor, *UN system*, dunia usaha, akademisi, dan organisasi profesi). Kegiatan WNPG ke XI Tahun 2018 diselenggarakan pada tanggal 3-4 Juli 2018 dengan tema “Percepatan Penurunan Stunting Melalui Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pada kegiatan *Indonesia Development Forum*, dunia usaha yang tergabung dalam Gernas-PPG membuka *booth*. Sedangkan pada the 1st SDGs Annual Conference telah dilakukan pembahasan dengan topik Peran Multi-Sektor dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting yang sangat relevan dengan Gernas PPG pada salah satu sesi paralel.

3. Pengembangan Program Gizi Spesifik dan Sensitif yang Terbukti Efektif

Pelaksanaan Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial (HITS) yang difokuskan pada area Kabupaten/Kota prioritas. Pada tahun 2017, intervensi penurunan stunting terintegrasi tersebut dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota, kemudian pada tahun 2018 diperluas menjadi 100 Kabupaten/Kota dan pada tahun 2019 direncanakan untuk dilaksanakan di 160 Kabupaten/Kota. Perluasan cakupan Kabupaten/Kota akan dilakukan secara bertahap sehingga pada tahun 2020-2024 akan mencakup seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

4. Pengembangan Pangkalan Data Percepatan Perbaikan Gizi.

Dalam kegiatan ini telah dilakukan: a) Pengembangan *Dashboard* data terpadu dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi tentang profil masing-masing Kabupaten/Kota yang dapat diakses secara *real time*. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan informasi terkini tentang perkembangan pelaksanaan dan pencapaian intervensi gizi terintegrasi di masing-masing wilayah fokus; b) Pengembangan *Knowledge Platforms* dilaksanakan sebagai media koordinasi dan penyampaian komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara lebih luas. Saat ini Sekretariat Gernas-PPG telah memiliki berbagai sarana *Knowledge Platforms* yaitu Website *cegahstunting.id*, Media sosial, dan *WhatsApps* (WA) groups.

5. Kegiatan Lainnya

Kegiatan lainnya yang telah dilakukan antara lain: a) Penyusunan regulasi dalam rangka pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di 100 Kabupaten/Kota melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 440/1959/SJ di Tahun 2018. Inmendagri ini menginstruksikan kepada kepala daerah 100 Kabupaten/Kota fokus untuk melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi; b) Penyusunan Pedoman Penandaan, Pelacakan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi yang bertujuan untuk membantu K/L dalam mengidentifikasi output penandaan anggaran dalam strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan stunting; c) Menyelenggarakan Pra Workshop Nasional Fortifikasi Pangan pada tanggal 25 September 2018. Hasil pra Workshop tersebut dijadikan sebagai masukan pelaksanaan Workshop Fortifikasi Pangan Nasional ke-2 yang direncanakan pada awal tahun 2019; d) Penyelenggaraan kegiatan Mitra Gernas-PPG termasuk dunia usaha, organisasi masyarakat madani, perguruan tinggi dan organisasi profesi, dan mitra pembangunan dan UN-System. Selain itu, melalui koordinasi pelaksanaan program *Investment in Nutrition and Early Years (INEY)* telah diluncurkan Dokumen Strategi Nasional (StraNas) percepatan penurunan stunting. Adapun tujuan umum dari StraNas adalah untuk mempercepat upaya pencegahan dan penurunan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada.

Rekomendasi

Peningkatan upaya percepatan perbaikan gizi perlu difokuskan kepada penguatan advokasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan. Selain itu, jaringan kemitraan yang kuat dari sektor di luar pemerintah seperti organisasi masyarakat madani, dunia usaha, akademisi dan organisasi profesi.

Revisi Perpres 42/2013 diperlukan untuk sebagai payung hukum yang kuat dalam upaya peningkatan percepatan perbaikan gizi yang efektif. Fokus utama yang diperlukan dalam revisi Perpres tersebut adalah penguatan kelompok kerja, dan melakukan pelaporan kegiatan percepatan perbaikan gizi secara rutin. Selain itu, finalisasi dokumen *conflict of interest* diperlukan sebagai pedoman dalam mengelola dan mencegah konflik antara pemangku kepentingan dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.

Dalam tatanan pelaksanaan teknis, diperlukan pendampingan kepada daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan percepatan perbaikan gizi. Penguatan pendampingan penyusunan RAD-PG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan inovasi yang sesuai dengan konteks lokal.

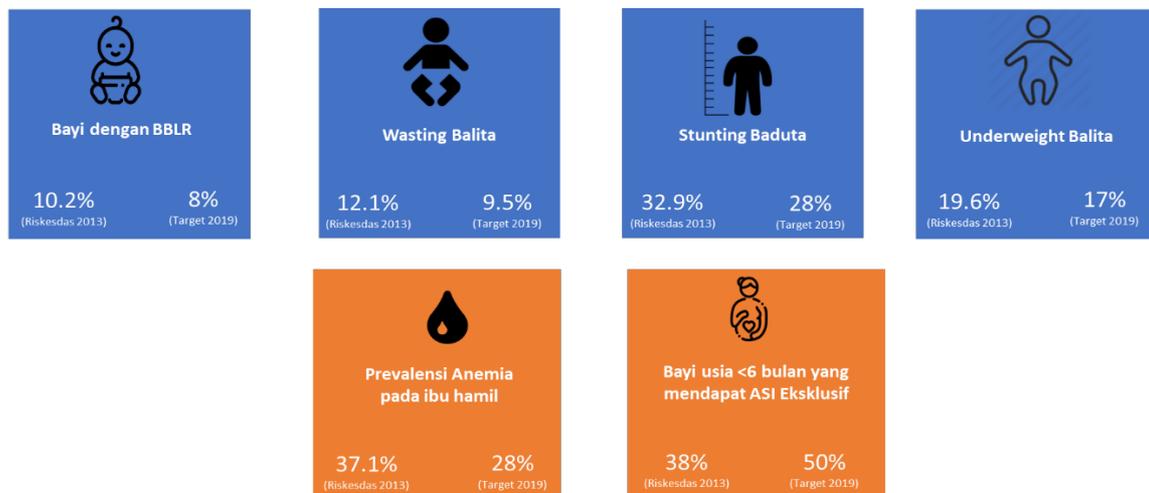
Untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan percepatan perbaikan gizi, *budget tracking* secara berkesinambungan diperlukan untuk menganalisis jumlah anggaran dan pengeluaran keuangan dalam bidang gizi spesifik maupun sensitif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan dan perbaikan di tahun berikutnya.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta penguatan promosi dan preventif diantaranya melalui percepatan perbaikan gizi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah mencantumkan bahwa “Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang seimbang, serta terjamin dalam rangka mencapai status gizi yang baik”.

Sejalan dengan hal di atas, telah diterbitkan Perpres 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) dengan fokus kegiatan pada 1.000 HPK. Gerakan ini merupakan upaya bersama antara pemerintah dan non-pemerintah melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian secara terencana dan terkoordinasi. Untuk memperkuat sistem pangan dalam menjamin konsumsi yang optimal, maka diterbitkan Perpres 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi sebagai dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi baik di tingkat Pusat dan Daerah. Adapun target perbaikan status gizi dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi adalah:



Gambar 1.1 Target Perbaikan Status Gizi dalam Rencana Aksi Pangan dan Gizi

Hasil Riset Kesehatan Dasar menunjukkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, telah terjadi perbaikan gizi terutama pada stunting. Pada tahun 2013 stunting pada anak balita mencapai 37,2% dan pada anak baduta 32,9% kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 30.8% balita dan 29.9% anak baduta.

Sasaran utama kegiatan Gernas-PPG adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak Balita, dan remaja putri. Empat strategi utama Gernas-PPG meliputi: 1) Menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian; 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta; 3) Peningkatan kualitas dan integrasi pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif; dan 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menerapkan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

1.2. Tujuan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Tujuan Umum

Kegiatan koordinasi strategis Gernas-PPG dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor baik pemerintah maupun non-pemerintah, lintas program dan wilayah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program perbaikan gizi.

Tujuan Khusus

Tujuan khusus kegiatan ini mencakup :

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan percepatan perbaikan gizi di lingkungan Pemerintah dan Pemangku Kebijakan lainnya;
- b. Menyusun rekomendasi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kegiatan percepatan perbaikan gizi tahun 2018;
- c. Membantu dan menyiapkan daerah merumuskan rencana aksi dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat menjadi panduan/acuan bagi institusi pemerintah, masyarakat dan pelaku lain yang bergerak dalam perbaikan pangan dan gizi di daerah (provinsi maupun kabupaten/kota).

Ruang Lingkup

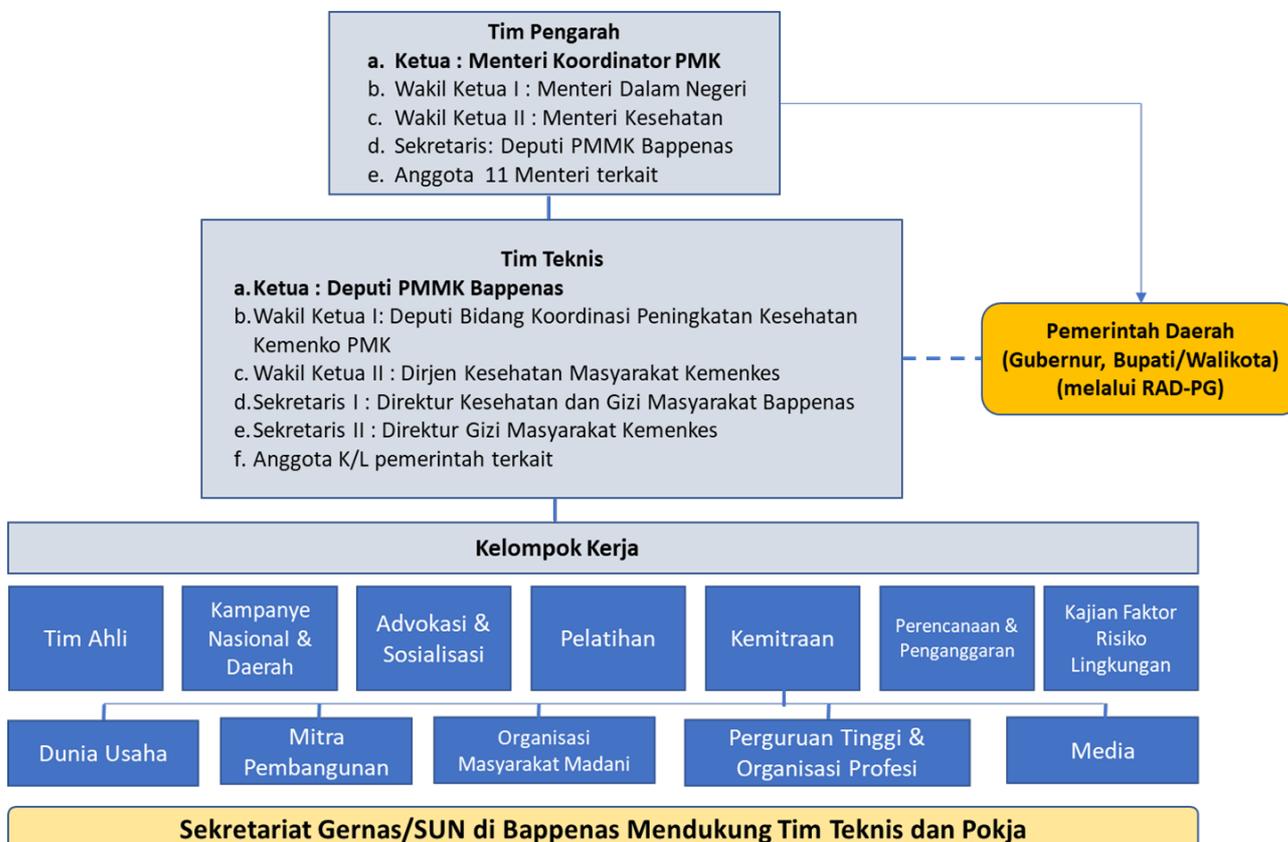
Ruang lingkup koordinasi strategis Gernas-PPG antara lain adalah:

- a. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan percepatan perbaikan gizi tahun 2018.
- b. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan Tahun Gizi Tahun 2018.
- c. Sosialisasi dan Pendampingan penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi.
- d. Melakukan koordinasi kegiatan strategis yang terkait kegiatan percepatan perbaikan gizi di Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- e. Melaksanakan koordinasi kegiatan percepatan perbaikan gizi antar kementerian/lembaga, pemerintah, dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan.

BAB II. KEGIATAN GERNAS-PPG

2.1. Struktur Organisasi

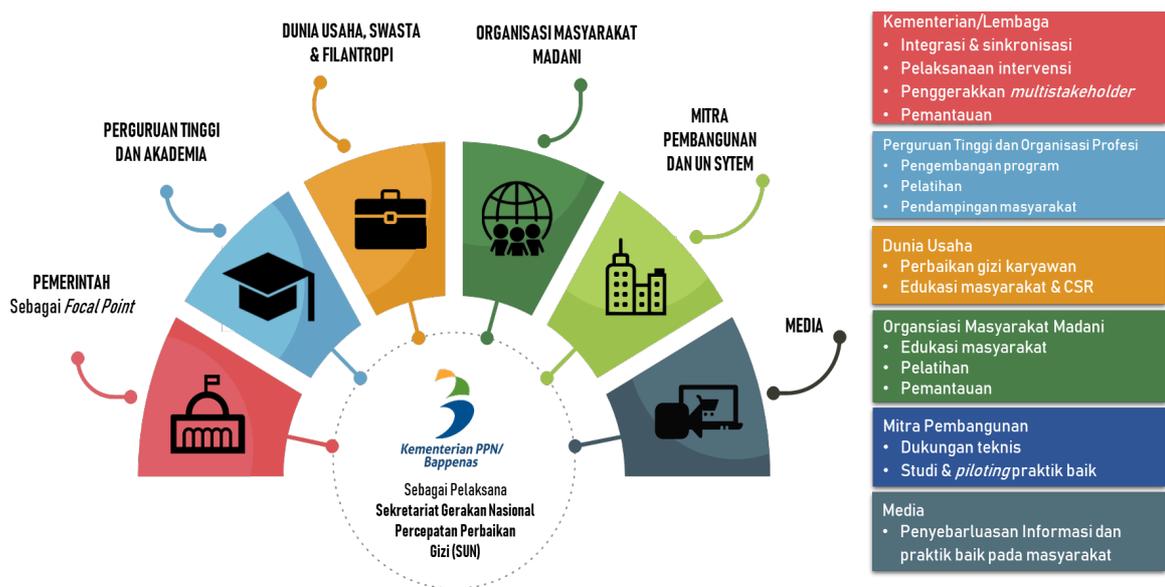
Struktur organisasi Gernas-PPG melibatkan tiga belas Kementerian/Lembaga dan terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri-PMK) dan Tim Teknis yang diketuai oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas. Beberapa Kelompok Kerja telah dibentuk untuk mendukung kegiatan Gernas-PPG seperti: tim ahli, kampanye nasional dan daerah, advokasi dan sosialisasi, pelatihan, kemitraan, perencanaan dan penganggaran, serta kajian faktor risiko lingkungan. Sekretariat Gernas-PPG dibentuk untuk memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan Gernas-PPG. Struktur organisasi Gernas-PPG secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Gernas-PPG Berdasarkan Perpres 42/2013

Sesuai dengan perkembangan percepatan perbaikan gizi, maka perlu dilakukan revisi terhadap Perpres 42/2013. Mitra kerja Gernas-PPG terdiri dari pemerintah, akademisi dan perguruan tinggi, organisasi masyarakat madani, mitra pembangunan, dunia usaha, dan media.

Sampai tahun 2017, sejumlah 17 Kementerian/Lembaga, 14 mitra pembangunan/*UN System*, 28 dunia usaha, 27 organisasi masyarakat madani, 13 perguruan tinggi, serta 11 organisasi profesi telah berpartisipasi dalam jejaring Gernas-PPG (Lampiran 1). Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan perencanaan dan penganggaran, koordinasi lintas sektor, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan perbaikan gizi masyarakat. Peran utama dari masing-masing sektor dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut ini:



Gambar 2.2. Peran Lintas Sektor dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Peta Jalan Sekretariat Gernas-PPG telah diluncurkan pada tanggal 9 Maret 2017 sebagai panduan bagi Sekretariat Gernas-PPG dalam memberikan dukungan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan Perpres 42/2013. Peta Jalan juga digunakan untuk meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat Gernas-PPG dalam mendukung Tim Teknis melaksanakan peran koordinasi perencanaan dan penganggaran serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan percepatan perbaikan gizi.

Ruang lingkup Peta Jalan Gernas-PPG meliputi analisis situasi, tantangan, isu strategis, dan rencana kerja Sekretariat Gernas-PPG. Peta Jalan merupakan *living document* yang dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan kondisi dan situasi. Penyusunan Peta Jalan Gernas-PPG menggunakan *stunting* digunakan sebagai *entry poin* dalam penanggulangan masalah gizi lainnya. Peta Jalan Gernas-PPG menitikberatkan pada intervensi 1,000 HPK dan melibatkan multisektor seperti Pemerintah, Organisasi Masyarakat Madani, Akademisi dan Organisasi Profesi, Dunia Usaha, dan Mitra Pembangunan dan *UN System*.

Pelaksanaan Gernas-PPG menggunakan prinsip holistik, integratif, tematik, dan spasial. Oleh karena itu intervensi yang dilakukan merupakan intervensi gizi terintegrasi yang meliputi intervensi gizi spesifik dan sensitif yang terbukti efektif dalam percepatan perbaikan gizi. Rencana Kerja Sekretariat Gernas-PPG dapat di lihat pada gambar 2.3. di bawah ini:



Gambar 2.3. Rencana Kerja Sekretariat Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

2.2. Kegiatan Advokasi, Kampanye, Sosialisasi, dan KIE Perubahan Perilaku

Pengembangan strategi advokasi, komunikasi, dan Perubahan Perilaku

Pemahaman tentang upaya perbaikan gizi dan kesehatan terutama pada 1.000 HPK sudah semakin meningkat sejak pelaksanaan Gernas-PPG. Namun yang masih menjadi tantangan sampai saat ini adalah belum tersedia dokumen strategi advokasi, komunikasi, dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) perubahan perilaku secara nasional. Dokumen ini diperlukan sebagai panduan baik untuk pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan advokasi bagi para *stakeholder* kunci percepatan perbaikan gizi. Selain itu strategi komunikasi dan KIE yang menyeluruh dalam perubahan perilaku masyarakat yang mendukung upaya percepatan perbaikan gizi dan kesehatan masih perlu dikembangkan.

Pada tahun 2017, IMA Worldhealth bekerja sama dengan Persagi telah melakukan penyusunan *policy brief*, penyusunan pedoman keagamaan dan pelatihan untuk tokoh agama dan kader, dan kampanye tematik di berbagai media (TV, radio, cetak, dan sosial) untuk upaya percepatan perbaikan gizi khususnya stunting. Saat ini Direktorat Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Kementerian Kesehatan dengan dukungan Bank Dunia sedang mengembangkan strategi nasional komunikasi dan perubahan perilaku termasuk komunikasi interpersonal. Strategi ini ditargetkan akan selesai pada kuartal kedua tahun 2019. Selain itu, *Tanoto Foundation* bekerja sama dengan *Life and Thrive* sedang melakukan *formative research* yang akan digunakan untuk memberikan masukan dalam pembuatan strategi komunikasi perubahan perilaku.

Pendekatan strategi advokasi memiliki tiga elemen utama, yaitu:

1. Advokasi kepada para pimpinan pusat dan daerah, pemangku kepentingan, dan tokoh masyarakat melalui dialog kebijakan publik dan dukungan regulasi.
2. Komunikasi masa melalui media cetak dan elektronik, media sosial, dan media tradisional yang memungkinkan seperti kesenian daerah.
3. Mobilisasi masyarakat dan komunikasi interpersonal melalui edukasi kelompok dan

Media gathering untuk percepatan penurunan stunting

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas dengan dukungan Sekretariat Gernas-PPG telah melakukan berbagai kegiatan *media gathering* sebagai bagian dari advokasi, kampanye, dan komunikasi percepatan perbaikan gizi terutama untuk penurunan stunting. Pada tanggal 28 Mei 2018, Bappenas mengundang media masa untuk memberikan pemahaman tentang stunting untuk dapat disebarluaskan lebih lanjut kepada masyarakat luas. Media memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi tentang upaya percepatan perbaikan gizi terutama penurunan stunting dalam 1.000 HPK.

Rembuk stunting tingkat nasional dan kabupaten

Stunting Summit atau Rembuk Stunting tingkat nasional, provinsi dan kabupaten bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan kapasitas pemerintah daerah serta pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan program perbaikan gizi. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2018 di Hotel Borobudur Jakarta dan dihadiri oleh para pimpinan daerah dari 34 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota fokus penurunan stunting. Peserta pertemuan terdiri dari Gubernur, Bupati/Walikota, pimpinan perangkat daerah, perwakilan Kementerian/Lembaga, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat madani, media massa, dan kepala desa. Acara ini di buka oleh Bapak Wakil Presiden Indonesia.

Pada tanggal 21-23 November 2018, Kantor Sekretariat Wakil Presiden/TNP2K kembali mengundang 34 Provinsi dan 100 Kabupaten/Kota untuk membahas tindak lanjut yang diperlukan termasuk penandatanganan komitmen bersama serta memberikan arahan teknis tentang pelaksanaan kegiatan penurunan stunting terintegrasi. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang peserta baik dari pemerintah pusat dan daerah. Hasil utama dari kegiatan rapat koordinasi ini adalah adanya kegiatan percepatan penurunan stunting di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Kampanye Gizi Pencegahan Stunting

Kantor Staf Presiden (KSP) telah menginisiasi kampanye nasional pencegahan stunting yang diluncurkan pada tanggal 16 September 2018 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Peluncuran kampanye nasional ini dilaksanakan atas kerja sama KSP dengan Bappenas, Kementerian Kesehatan, Dunia Usaha, dan Organisasi Masyarakat Madani. Kampanye nasional ini dihadiri oleh lebih dari 10.000 peserta.

Kemitraan dalam pelaksanaan kampanye gizi di atas dilanjutkan di berbagai daerah lainnya, seperti Jawa Barat (18 November 2018), Yogyakarta (14 Desember 2018), dan Jawa Timur (14 Desember 2018) yang dipimpin langsung oleh Gubernur dan dihadiri oleh para Bupati/Walikota dari masing-masing Kabupaten/Kota. Selain itu, beberapa Kabupaten/Kota juga melaksanakan kampanye/deklarasi pencegahan stunting secara mandiri seperti di Provinsi Nusa Tenggara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang.

2.3. Kegiatan Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Rencana Aksi Nasional/Daerah Pangan dan Gizi

Dalam rangka pelaksanaan Perpres 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) yang ditetapkan pada 18 Agustus 2017, maka dilakukan penyesuaian dengan RAN-PG dengan menyusun RAN-PG 2017-2019, yang terdiri dari lima pilar, yaitu: 1) Perbaikan gizi masyarakat; 2) Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam; 3) Mutu dan Keamanan Pangan; 4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; serta 5) Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi.

Tujuan utama penyusunan RAN-PG adalah sebagai acuan bagi daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran program gizi di daerah. Dokumen Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2017-2019 disusun melalui rangkaian pertemuan berkelanjutan yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan pilar RAN-PG (Tabel 2.1).

Tabel 2.1 Pilar Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

Pilar 1 Perbaikan Gizi Masyarakat	Pilar 2 Peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam	Pilar 3 Mutu dan Keamanan Pangan	Pilar 4 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Pilar 5 Koordinasi Pangan dan Gizi
<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan pendidikan gizi masyarakat • Pemberian suplementasi gizi • Pelayanan kesehatan dan masalah gizi • Pemberdayaan masyarakat di bidang pangan dan gizi • Jaminan sosial yang mendukung perbaikan pangan dan gizi • Pendidikan anak usia dini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi pangan dalam negeri 2. Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal 3. Distribusi pangan 4. Konsumsi kalori, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral 5. Peningkatan akses pangan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang mengalami rawan pangan dan gizi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan regulasi dan standar gizi • Pengawasan keamanan pangan segar • Pengawasan keamanan pangan olahan • Pengawasan pangan sarana air minum dan tempat-tempat umum • Promosi keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan dan pengendalian penyakit menular • Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular • Penyediaan air bersih dan sanitasi • Penerapan kawasan tanpa rokok • Penerapan perilaku sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pangan dan gizi • Penguatan peranan lintas sektor • Penguatan pencatatan sipil dalam perbaikan gizi • Pelibatan pemangku kepentingan • Pemantauan dan evaluasi • Penyusunan dan penyampaian laporan

Di tingkat daerah, Pemerintah menyusun rencana aksi pangan dan gizi (RAD-PG) sesuai dengan kondisi lokal dan juga diharapkan untuk dapat melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan kondisi setempat dengan tetap mengacu pada kerangka pangan dan gizi nasional. Hingga Desember 2018, dilaporkan sebanyak 29 Provinsi yang telah menyelesaikan penyusunan RAD-PG dan juga telah dikaji oleh tim pusat, 21 provinsi di antaranya telah menetapkannya ke dalam Peraturan Gubernur.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN/D-PG dilakukan baik di tingkat pusat dan daerah/provinsi. Substansi kegiatan pemantauan yang dilakukan di tingkat pusat meliputi indikator kinerja utama, program, kegiatan, pendanaan, permasalahan dan rencana tindak lanjut. Apabila diperlukan, pemantauan dapat diperluas pada kegiatan yang dilakukan oleh dunia usaha, masyarakat madani, dan mitra pembangunan. Kegiatan pemantauan dilakukan minimal dua kali setahun terdiri dari pertengahan dan akhir tahun.

Pemantauan dan evaluasi RAD-PG ditingkat Daerah dilakukan dengan cara pemerintah provinsi mengirimkan laporan ke pusat pada semester satu dan semester kedua. Laporan provinsi akan menjadi bahan pembahasan pada pertemuan pemantauan dan evaluasi RAD-PG tingkat Nasional/Regional.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi RAD-PG tingkat provinsi tahun 2017 telah dilaksanakan dalam dua lokakarya regional, yaitu: 1) Lokakarya pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi untuk regional tengah dan timur (Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua) dilaksanakan tanggal 24 November 2017 di Provinsi D.I. Yogyakarta; dan 2) Lokakarya pemantauan dan evaluasi RAD-PG Provinsi Regional Barat (Sumatera dan Jawa) tanggal 13 Desember 2017 di Provinsi DKI Jakarta.

Lokakarya pemantauan dan evaluasi RAD-PG di tahun 2018 dilakukan sebanyak dua kali pada tingkat regional. Lokakarya pertama dilakukan pada tanggal 5-8 September 2018 untuk regional barat dan tanggal 19-22 September 2018 untuk regional tengah dan timur. Beberapa hasil utama dari lokakarya pemantauan dan evaluasi RAD-PG tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Hasil Utama Lokakarya RAD-PG Tahun 2018

KEKUATAN	TANTANGAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. RAD-PG telah memperkuat proses perencanaan dan penganggaran untuk setiap sektor di kabupaten/kota dan desa 2. RAD-PG digunakan sebagai media advokasi untuk anggota parlemen 3. RAD-PG telah menginisiasi koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah 4. RAD-PG dijadikan panduan untuk sinkronisasi program/kegiatan dan penganggaran di pusat dengan daerah 5. RAD-PG telah memetakan berbagai praktik baik dari kabupaten/kota terkait program/kegiatan gizi dan kesehatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesenambungan komitmen dari pimpinan tertinggi di daerah 2. Pergantian staf di tingkat daerah 3. Pemahaman peran RAD-PG dalam upaya percepatan perbaikan gizi masih perlu ditingkatkan 4. Penganggaran untuk kegiatan gizi dan pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan 5. Koordinasi dan komunikasi antar kedinasan di tingkat daerah 6. Desentralisasi dan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di tingkat daerah 7. Pemantauan dan evaluasi kegiatan yang masih perlu ditingkatkan

Rembuk Stunting Kabupaten/Kota

sebagai tindak lanjut hasil Rapat Terbatas tentang masalah stunting yang dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden pada tanggal 9 Agustus 2017 di Kantor Wakil Presiden, Bappenas bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Mitra Pembangunan (World Bank, UNICEF, dan MCA-I) telah menyelenggarakan kegiatan Rembuk Stunting tahap pertama pada tanggal 27-30 November 2017. Peserta Rembuk Stunting tahap pertama terdiri 8 Kabupaten/Kota (Klaten, Kulon Progo, Nganjuk, Banggai, Polewali Mandar, Lombok Barat, Sumbawa, serta Maluku Tengah).

Rembuk Stunting tahap kedua dan ketiga dilakukan pada tanggal 26-28 Maret 2018. Peserta Rembuk Stunting terdiri dari 26 Kabupaten/Kota (Ogan Komering Ilir, Ketapang, Sukabumi, Cianjur, Garut, Kuningan, Sumedang, Subang, Bandung Barat, Mamuju, Majene, Gorontalo, Boalemo, Trenggalek, Malang, Pamekasan, Lombok Tengah, Lombok Timur, Dompu, Lombok Utara, Timor Tengah Utara, Manggarai, Sumba Timur, Lembata, Rote Ndao, dan Manggarai Timur).

Tujuan pelaksanaan kegiatan Rembuk Stunting adalah untuk meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan kunci di daerah dalam penurunan stunting serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan advokasi pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi. Tindak lanjut dari

Output yang diharapkan dalam Rembuk Stunting adalah setiap Kabupaten/Kota memiliki *draft* perencanaan penurunan stunting terintegrasi, yang mencakup:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran;
2. Peningkatan cakupan program secara holistik, integratif, tematik, dan spasial
3. Strategi advokasi, sosialisasi, dan komunikasi interpersonal
4. Manajemen serta *tools* pemantauan dan evaluasi.

pelaksanaan Rembuk Stunting adalah setiap Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kegiatan penurunan stunting terintegrasi yang sudah ada di daerahnya.

Gernas-PPG *Joint Assessment* 2018

Sebagai bagian dari *SUN Global Movement*, maka Sekretariat Gernas-PPG melakukan *The 2018 Joint-Assessment Workshop* yang rutin dilakukan setiap tahun untuk mengukur komitmen dan pencapaian 4 strategi pelaksanaan *SUN Movement Strategy and Roadmap 2016-2020*. Tujuan dari pelaksanaan *SUN Joint Assessment* adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis kemajuan masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam *SUN Movement* di tiap negara
- b. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam percepatan perbaikan gizi

- c. Mengidentifikasi isu prioritas tahun 2018 – 2019 serta dukungan yang diperlukan untuk mencapainya
- d. Memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan bagi *SUN Movement Global*, termasuk *SUN Movement Executive Committee, Lead Group, Networks, Experts, Coordinator, and Secretariat*
- e. Laporan Hasil *Joint-Assessment Workshop* menjadi dasar bagi *SUN Movement Annual Progress Report, SUN Movement website and partners' report*, termasuk *Global Nutrition Report*

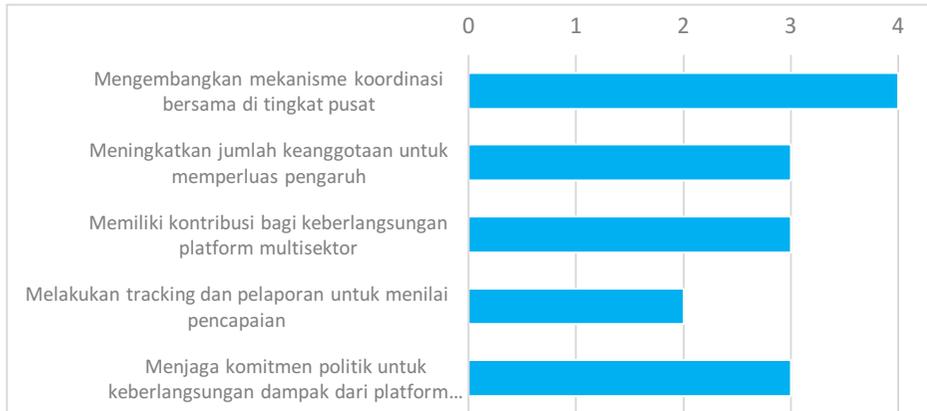
Gernas-PPG *Joint Assessment 2018* dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2018 dan dihadiri oleh lebih dari 75 orang peserta yang mewakili dari masing-masing pemangku kepentingan (pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga donor, *UN system*, dunia usaha, akademisi, dan organisasi profesi. Hasil utama dari *Joint Assessment 2018* dapat di lihat pada gambar 2.4.

Secara umum, hasil *Joint Assessment* menunjukkan bahwa Gernas-PPG di Indonesia telah membuka ruang koordinasi dan kontribusi bagi para pemangku kepentingan dan memberikan dampak yang positif terhadap upaya percepatan perbaikan gizi di Indonesia. Beberapa kegiatan yang masih perlu ditingkatkan adalah kesinambungan pelaksanaan koordinasi antar *network*, pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, serta kemitraan antar anggota *network* dalam upaya peningkatan perbaikan gizi di Indonesia.

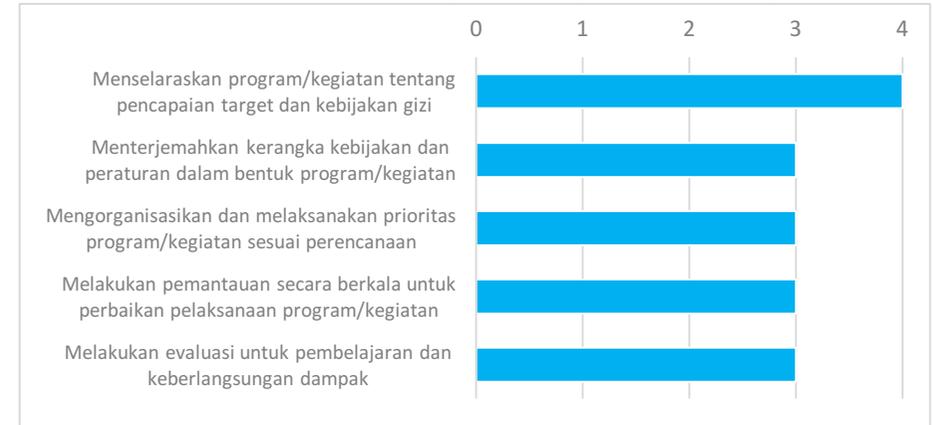
Gambar 2.4 Hasil Lokakarya Gernas-PPG Joint Assessment Tahun 2018

Keterangan: 0 = belum dimulai ; 1 = direncanakan; 2 = pelaksanaan ; 3 = hampir selesai; 4 = sudah selesai

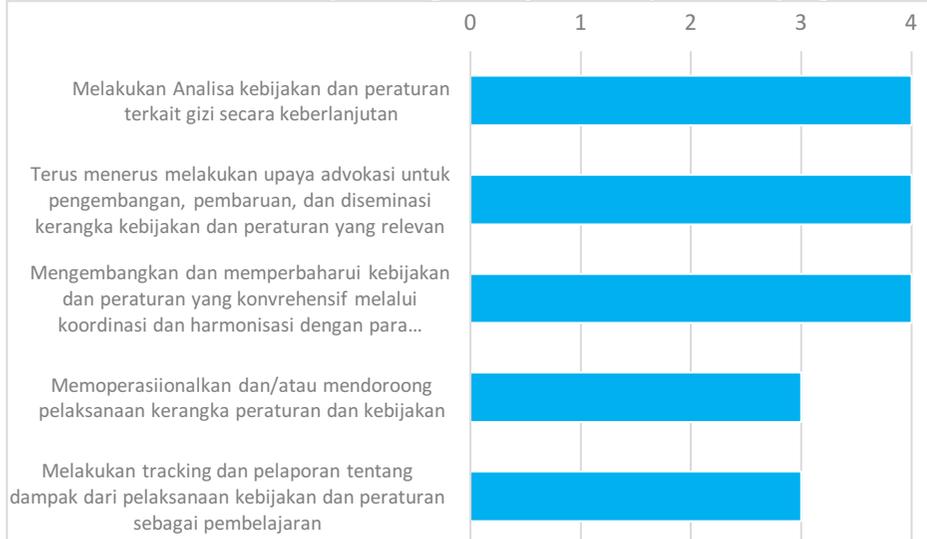
Proses 1. Mengumpulkan para pemangku kepentingan untuk sebuah aksi



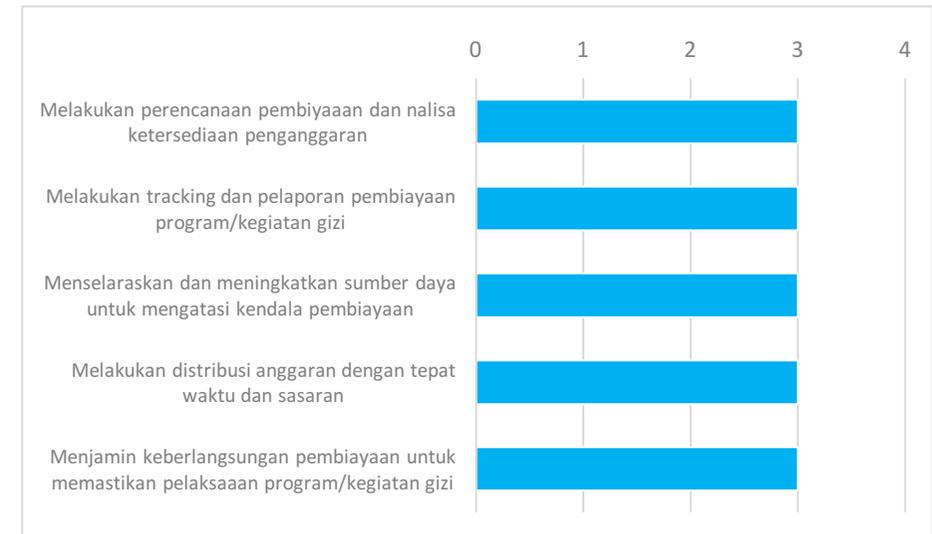
Proses 3. Sinkronisasi perencanaan kegiatan dengan para pemangku kepentingan



Proses 2. Memastikan adanya kerangka kebijakan dan peraturan yang koheren



Proses 4. Memantau pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran



Widyakarya Pangan dan Gizi XI Tahun 2018

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) merupakan kegiatan ilmiah setiap lima tahun sekali yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bersama Kementerian/Lembaga terkait. Hasil WNPG digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah dalam penyusunan RPJMN khususnya dalam pembangunan pangan dan gizi. Tema WNPG Tahun XI Tahun 2018 yang akan diselenggarakan pada tanggal 3-4 Juli 2018 adalah *“Percepatan Penurunan Stunting Melalui Revitalisasi Ketahanan Pangan dan Gizi Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”*.

Ruang lingkup pembahasan WNPG XI terdiri dari lima bidang, yaitu: 1) Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan koordinator Kementerian Kesehatan, 2) Peningkatan Aksesibilitas Pangan yang Beragam, dengan koordinator Kementerian Pertanian, 3) Mutu dan Keamanan Pangan, dengan koordinator BPOM dan Badan Standardisasi Nasional, 4) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan koordinator Kementerian Kesehatan, 5) Koordinasi Pembangunan Pangan dan Gizi, dengan koordinator Kementerian PPN/BAPPENAS. Sebagai koordinator Bidang 5, Kementerian PPN/Bappenas dalam hal ini dikoordinasikan oleh Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat melakukan kajian dari berbagai aspek (ekonomi, sosial budaya, industri, dan teknologi pangan) dalam pencegahan dan penurunan stunting,

Indonesia Development Forum dan SDGs Conference

Gernas-PPG terlihat secara aktif dalam kegiatan *Indonesia Development Forum* (IDF) dan the 1st SDG's Annual Conference tahun 2018. Pada kegiatan IDF, Gernas-PPG membuka *booth* selama kegiatan IDF berlangsung pada 7-8 Juli 2018 di Jakarta. Sedangkan pada the 1st SDGs Annual Conference, Gernas-PPG membantu Bappenas dalam mempersiapkan dan melaksanakan sesi paralel dengan topik peran multi-sektor dalam pencegahan dan penurunan stunting. Gernas-PPG terus menggalakkan peran kemitraan dalam upaya percepatan perbaikan gizi termasuk stunting di Indonesia.

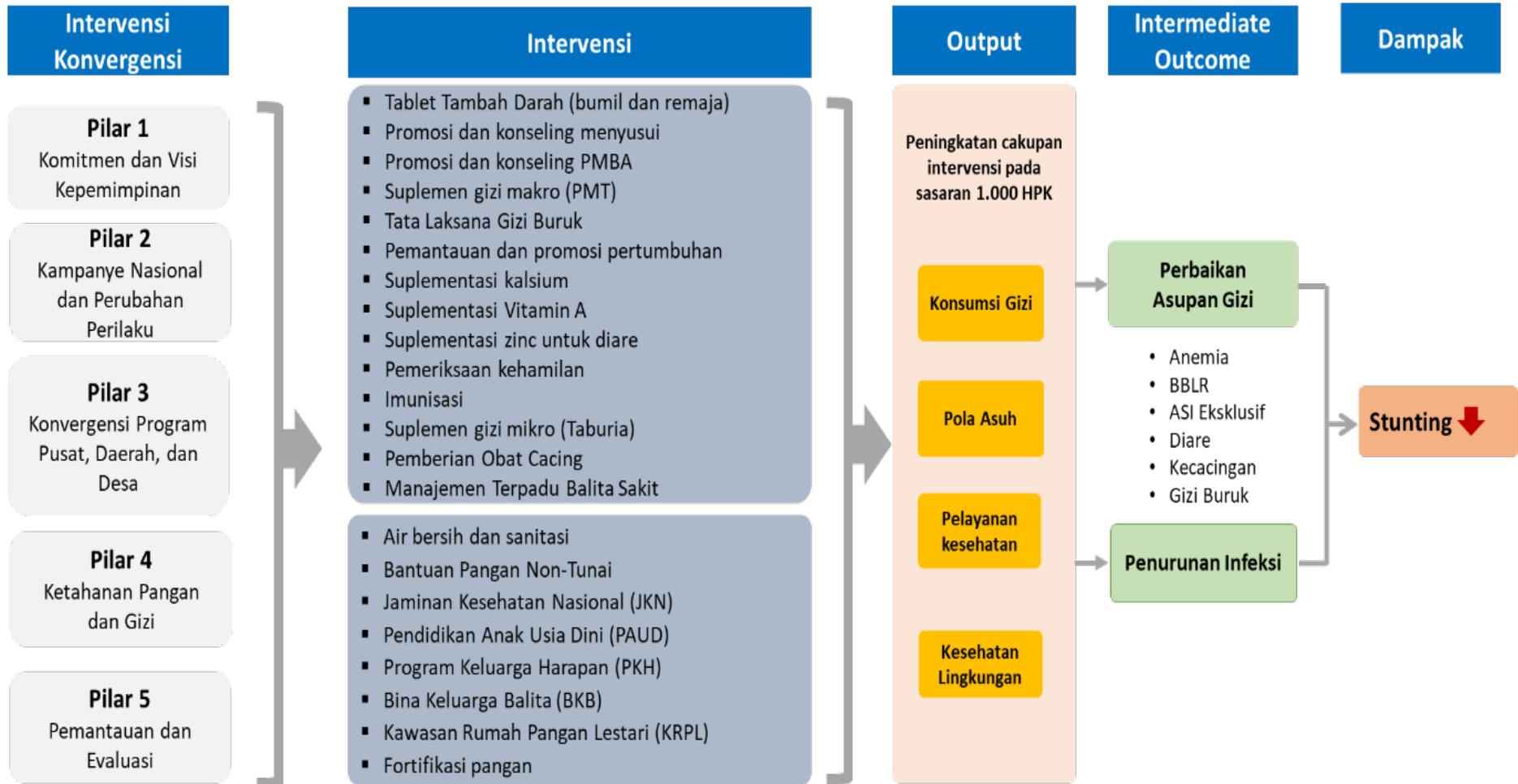
2.4. Kegiatan Pengembangan Program Gizi Spesifik dan Sensitif yang Terbukti Efektif

Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi

Upaya percepatan perbaikan gizi telah mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Rapat Koordinasi Bapak Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli dan 9 Agustus 2017 yang menyepakati pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi lintas sektor dengan lokasi fokus serta pengembangan strategi kampanye gizi. Hal tersebut diperkuat dengan pidato Kenegaraan dari Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus 2017 yang menyampaikan bahwa “...Pembangunan sumber daya manusia akan terus berlanjut. Pemerintah bukan hanya konsentrasi untuk mengurangi dampak kekurangan gizi kronis, menekan angka stunting, tapi juga menyiapkan generasi muda yang berkualitas, yang terampil dan siap untuk berkompetisi.”

Upaya penurunan *stunting* dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung dan intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung. Selain mengatasi penyebab langsung dan tidak langsung, diperlukan prasyarat pendukung yang mencakup komitmen politik dan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi. Selain itu, keterlibatan lintas sektor dan kapasitas pelaksana kegiatan harus terus ditingkatkan. Kerangka konseptual intervensi penurunan *stunting* terintegrasi (Gambar 2.5.) merupakan panduan bagi dalam penurunan kejadian *stunting*. Target indikator utama dalam intervensi penurunan *stunting* terintegrasi adalah:

1. Prevalensi *stunting* pada anak baduta dan balita
2. Persentase bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
3. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita
4. Prevalensi *wasting* (kurus) anak balita
5. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif
6. Prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri
7. Prevalensi kecacangan pada anak balita
8. Prevalensi diare pada anak baduta dan balita



Gambar 2.5. Kerangka Konseptual Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi

Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya *stunting* seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Ada tiga kelompok intervensi gizi spesifik, yaitu (Tabel 2.3.):

- a. **Intervensi prioritas**, yaitu intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas;
- b. **Intervensi pendukung**, yaitu intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain yang terkait stunting dan diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan.
- c. **Intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu**, yaitu intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana (program gizi darurat).

Tabel 2.3 Intervensi Gizi Spesifik Percepatan Penurunan Stunting

Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung Prioritas	Intervensi Prioritas Kondisi Tertentu
Kelompok Sasaran 1.000 HPK			
Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dari kelompok miskin/ Kurang Energi Kronik (KEK) • Suplementasi tablet tambah darah 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi kalsium • Pemeriksaan kehamilan 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dari malaria • Pencegahan HIV
Ibu menyusui dan anak 0-23 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi dan konseling menyusui • Promosi dan konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) • Tata laksana gizi buruk • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus • Pemantauan dan promosi pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi kapsul vitamin A • Suplementasi taburia • Imunisasi • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan kecacingan

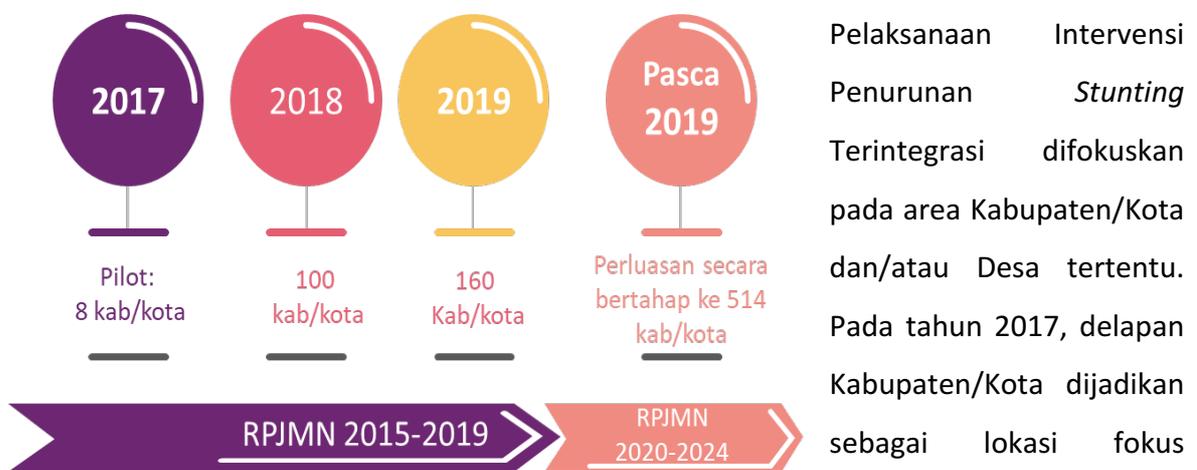
Kelompok Sasaran	Intervensi Prioritas	Intervensi Pendukung Prioritas	Intervensi Prioritas Kondisi Tertentu
Kelompok Sasaran Usia lainnya			
Remaja putri dan wanita usia subur	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi tablet tambah darah 		
Anak 24-59 bulan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata laksana gizi buruk • Pemberian makanan tambahan pemulihan bagi anak kurus • Pemantauan dan promosi pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suplementasi kapsul vitamin A • Suplementasi gizi mikro • Suplementasi zinc untuk pengobatan diare • Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan kecacingan

Intervensi gizi sensitif mencakup: a) Peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi; b) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan; c) Peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; (c); dan (d) Peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan sebagaimana tercantum di dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Intervensi Gizi Sensitif Percepatan Penurunan *Stunting*

Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi
Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum yang aman • Akses sanitasi yang layak
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Akses pelayanan Keluarga Berencana (KB) • Akses Jaminan Kesehatan (JKN) • Akses bantuan uang tunai untuk keluarga miskin (PKH)

Jenis Intervensi	Program/Kegiatan Intervensi
Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan informasi melalui berbagai media • Penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi • Penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua • Penyediaan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), promosi stimulasi anak usia dini, dan pemantauan tumbuh-kembang anak • Penyediaan konseling kesehatan dan reproduksi untuk remaja • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Peningkatan akses pangan bergizi	<ul style="list-style-type: none"> • Akses bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu • Akses fortifikasi bahan pangan utama (garam, tepung terigu, minyak goreng) • Akses kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) • Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan



Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi difokuskan pada area Kabupaten/Kota dan/atau Desa tertentu. Pada tahun 2017, delapan Kabupaten/Kota dijadikan sebagai lokasi fokus pelaksanaan. Selanjutnya,

pada tahun 2018, sebanyak 100 Kabupaten/Kota dan 1.000 Desa dijadikan area fokus pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* terintegrasi. Pada tahun 2019, intervensi penurunan *stunting* terintegrasi direncanakan untuk dilaksanakan di 160 Kabupaten/Kota dan 1.600 Desa. Pada tahun 2020-2024 akan diperluas secara bertahap sampai mencakup seluruh Kabupaten/Kota.

Sekretariat Gernas-PPG juga telah membantu tugas Bappenas dalam menyusun buku pedoman dan petunjuk teknis intervensi penurunan stunting terintegrasi. Pedoman dan petunjuk teknis telah diberikan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan *stunting summit* dan atau rembuk stunting tingkat nasional. Tujuan dari penyusunan buku pedoman dan petunjuk teknis intervensi penurunan stunting terintegrasi adalah sebagai panduan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan aksi integrasi untuk memperkuat efektivitas intervensi penurunan stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasi. Buku panduan dan petunjuk teknis ini dapat digunakan oleh provinsi dalam mengawal dan memberikan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota dalam melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi.

2.5. Kegiatan Pengembangan Pangkalan Data Percepatan Perbaikan Gizi

Pengembangan *Dashboard* data terpadu

Pengembangan *dashboard* data terpadu yang dapat diakses secara *real time* sangat diperlukan untuk memberikan informasi tentang *progress* pelaksanaan percepatan perbaikan gizi di masing-masing Kabupaten/Kota. Keberadaan data yang valid dan terkini sangat penting untuk kebutuhan pemantauan pelaksanaan program sebagai bagian dari akuntabilitas dan pembelajaran. Hasil pemantauan dari *dashboard* data terpadu dapat digunakan untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki pelaksanaan program jika diperlukan. *Dashboard* data terpadu sangat penting untuk perencanaan dan penganggaran program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pengerjaan *dashboard* sudah mulai dikerjakan sejak pertengahan tahun 2018 dengan dukungan dari berbagai pihak termasuk mitra pembangunan. Saat ini, *prototype dashboard* sedang di uji coba dan dapat dikatakan sudah mencapai 85% selesai. Rencananya *dashboard* data terpadu akan diluncurkan pada pertengahan tahun 2019.

Pengembangan Knowledge Platforms

Pengembangan *Knowledge Platforms* diperlukan sebagai media koordinasi dan penyampaian komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat secara lebih luas. Saat ini Sekretariat Gernas-PPG telah memiliki berbagai sarana *Knowledge Platforms* seperti berikut ini:

a. Website cegahstunting.id

Pengembangan website (<https://cegahstunting.id/>) ini di dukung penuh oleh UNICEF. Pengembangan website sudah dilakukan sejak akhir tahun 2017 dan masih terus dilakukan penyempurnaan sampai saat ini. Website ini diharapkan dapat memberikan informasi secara lengkap tentang upaya percepatan perbaikan gizi yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Media sosial

Media sosial Gernas-PPG diluncurkan bersamaan dengan pelaksanaan rembuk stunting nasional pada akhir November 2017. Pengembangan media sosial seperti Instagram (@gernas1000hpk), twitter (@gernas1000hpk), dan facebook (sekretariat stunting) ini di dukung oleh World Bank. Sekretariat Gernas-PPG telah menggunakan berbagai media sosial tersebut untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang upaya pemerintah dalam percepatan perbaikan gizi.

c. WhatsApps (WA) groups

Untuk mempermudah koordinasi dan komunikasi dengan para anggota Gernas-PPG yang terdiri dari pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi dan organisasi profesi, dunia usaha, dan mitra pembangunan maka dibuatlah beberapa WA grup. Beberapa WA grup yang saat ini sudah berjalan adalah: 1) RAN/D-PG – diikuti oleh 74 orang baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; 2) organisasi masyarakat madani – diikuti oleh 30 orang dari 25 organisasi; 3) SUN Business Network (SBN) – diikuti oleh 33 orang dari 20 perusahaan; 4) Donor and UN Country for Nutrition (DUNCNN) – diikuti oleh 20 orang dari 8 mitra pembangunan; dan 5) Kampanye Gizi – diikuti oleh lebih dari 50 orang dari berbagai latar belakang untuk mendiskusikan dan mempersiapkan kegiatan kampanye gizi baik di tingkat pusat maupun daerah.

2.6. Kegiatan Lainnya

Penyusunan Regulasi tentang Intervensi Gizi Terintegrasi

Dalam rangka percepatan penurunan prevalensi stunting, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri telah menyepakati dan menetapkan sebuah regulasi dalam rangka pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di 100 Kabupaten/Kota di Tahun 2018 melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 440/1959/SJ yang menginstruksikan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota fokus untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengintegrasikan program dan kegiatan penurunan stunting ke (lintas program dan lintas perangkat daerah) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
- b. Melaksanakan intervensi penurunan stunting terintegrasi yang terdapat pada kegiatan lintas program pada perangkat daerah sampai tingkat desa
- c. Menggerakkan Tim Penggerak PKK, LSM, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi keagamaan, akademisi dan perguruan tinggi, mitra pembangunan, masyarakat dan orang perseorangan untuk melakukan percepatan penurunan stunting
- d. Melaksanakan sinkronisasi kegiatan penurunan stunting yang dilakukan pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh sasaran sebagaimana mestinya
- e. Melakukan pemantauan secara rutin kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi untuk memastikan kegiatan berjalan sebagaimana mestinya

Penyusunan Pedoman Penandaan, Pelacakan, dan Evaluasi Kinerja Pembangunan dan Anggaran Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pedoman penandaan, pelacakan, dan evaluasi kinerja bertujuan untuk membantu K/L dalam mengidentifikasi *output* penandaan anggaran dalam strategi nasional percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Tujuan utama penyusunan dokumen ini adalah untuk memastikan program-program intervensi penurunan stunting terintegrasi baik spesifik dan sensitif dapat di pantau dan di evaluasi untuk efektivitas. Pemerintah akan memusatkan perhatian analisis penandaan anggaran pada beberapa *output* kritis untuk mencapai tujuan program.

Buku pedoman ini mencakup proses identifikasi *output* yang berkaitan dengan penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif dan mekanisme pelaksanaan serta siklus penandaan anggaran di K/L. Selain itu dilampirkan seluruh kode *output* terkait yang sudah diidentifikasi sebagai pijakan awal untuk melakukan pelacakan realisasi belanja serta evaluasi atas kinerja anggaran yang telah terjadi. Kode *output* yang telah diidentifikasi bersifat dinamis untuk dilakukan penambahan, pengurangan, ataupun restrukturisasi sejalan dengan kebutuhan dari Kementerian/Lembaga terkait. Secara lengkap, lingkup tanggung-jawab masing-masing pihak tampak di tabel 2.5. di bawah ini:

Tabel 2.5 Ruang Lingkup dalam Penandaan, Pelacakan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran

Proses	Bappenas (KRISNA)	Kementerian Keuangan	K/L
Program Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> dinyatakan sebagai prioritas pemerintah. Hal ini sudah dilakukan melalui deklarasi rencana aksi nasional yang diinisiasi Bappenas tahun 2018. Selanjutnya adalah memasukkan sebagai prioritas nasional di dalam RKP	√		
Program Penanganan <i>Stunting</i> dinyatakan sebagai anggaran tematik APBN di dalam PMK tentang tata cara penelaahan RKA-K/L		√	
Mengidentifikasi K/L yang memiliki <i>output</i> terkait dengan Stranas PPS dan mencoba melakukan “Penandaan Anggaran” untuk semua <i>output</i> terkait <i>stunting</i> yang ada di dalam KRISNA	√	√	√
Perhitungan biaya dan anggaran program, aktivitas, dan <i>ouput</i> terkait <i>stunting</i> .		√	√
Penyusunan alokasi anggaran tahunan dan penyelenggaraannya oleh Satker dalam RKA-K/L dan DIPA.		√	√
Pelacakan dan pemantauan penyerapan anggaran terkait <i>stunting</i> di dalam OM-SPAN		√	√
Penyusunan laporan reguler terkait alokasi dan kinerja anggaran.	√	√	√
Jika diperlukan, melakukan restrukturisasi <i>output</i> dengan membuat kode (program, kegiatan) baru terkait dengan <i>stunting</i> dan/atau <i>output</i> (khusus) terkait dengan perbedaan target lokasi.	√	√	√
Pemantauan dan Evaluasi program-program terkait Percepatan Penanganan <i>Stunting</i> .	√	√	√

Pra Workshop Nasional Fortifikasi Pangan

Fortifikasi Pangan di Indonesia secara resmi telah diterapkan terhadap: 1) Garam konsumsi yang wajib diperkaya dengan iodium, 2) Terigu sebagai bahan makanan wajib diperkaya dengan Fe, Zn, Asam Folat, dan Vitamin B1 dan B2, dan 3) Minyak goreng sawit diperkaya dengan vitamin A.

Pelaksanaan fortifikasi ketiga bahan pangan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan telaahan dan perbaikan secara menyeluruh. Salah satu masalah adalah kurangnya dukungan yang kuat dari sebagian instansi dan kelompok masyarakat karena kurangnya pemahaman atas tujuan, manfaat, persyaratan kelayakan serta pelaksanaan fortifikasi pangan, sehingga diperlukan advokasi dan sosialisasi yang meluas. Masalah selanjutnya adalah belum sinerginya sistem pemantauan dan penindakan terhadap kepatuhan produsen terhadap standar (SNI) yang ditetapkan pemerintah.

Dalam rangka mengarusutamakan kembali program fortifikasi pangan, direncanakan Workshop Fortifikasi Pangan Nasional ke-2 akan dilaksanakan di Jakarta pada awal tahun 2019. Hal ini dimaksudkan agar semua SNI fortifikasi wajib untuk garam, tepung terigu, dan minyak goreng sawit, dapat dilaksanakan dengan lebih efektif, sehingga makin nyata kontribusinya dalam mencapai sasaran *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya perbaikan gizi masyarakat dan penurunan angka *stunting*.

Kegiatan Mitra Gernas-PPG

Upaya percepatan perbaikan gizi tidak saja dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan dunia usaha, organisasi masyarakat madani, organisasi profesi dan perguruan tinggi, serta mitra pembangunan. Secara garis besar peranan dari masing-masing pemangku kepentingan adalah :

Dunia Usaha

Dunia usaha ikut memiliki peran penting dalam peningkatan status gizi masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dipetakan antara lain adalah: 1) Penyediaan fasilitas ruang

laktasi di lingkungan kerja; 2) Penyediaan layanan mobil unit sebagai sarana pemeriksaan kesehatan yang berjalan untuk ibu hamil dan sekaligus pemantauan pertumbuhan janin, dan pemantauan status gizi anak; 3) Edukasi tentang kesehatan dan gizi, penyediaan kantin sehat, dan program penurunan berat badan untuk karyawan; 4) Penyediaan paket pelayanan kesehatan dasar; serta (5) berbagai kegiatan penguatan kapasitas di tingkat Posyandu.

Organisasi Masyarakat Madani

Organisasi masyarakat madani melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah: 1) Melaksanakan pelatihan gizi dan kesehatan, pemberian IMD, ASI eksklusif, MP-ASI, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung pemberian makanan bayi dan balita, serta ketahanan pangan; 2) Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi; (3) Pemberian suplementasi vitamin A, tablet tambah darah, dan fortifikasi pangan; (4) Pelatihan tentang 1000 HPK untuk tokoh agama; serta (5) Pendidikan gizi dan kesehatan.

Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi

Perguruan Tinggi dan organisasi profesi melakukan: (1) pendampingan masyarakat; (2) pelatihan Konselor PMBA; (3) penyusunan modul asuhan gizi di masyarakat untuk tenaga gizi; (4) pengajaran materi perbaikan gizi dalam 1000 hari pertama kehidupan dalam perkuliahan; serta (5) melakukan kajian untuk bahan masukan perbaikan kegiatan ke depan.

Mitra Pembangunan

Mitra Pembangunan termasuk *UN-System* melakukan kegiatan antara lain: (1) memberikan bantuan teknis untuk pengembangan pedoman, panduan, dan penyusunan modul-modul penyelenggaraan kegiatan percepatan penurunan gizi, (2) melakukan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan, serta (3) melakukan studi, survei, dan *policy review* terkait percepatan perbaikan gizi.

Koordinasi pelaksanaan program Nutrition Investment in Early Years (INEY)

Dokumen Strategi Nasional (StraNas) percepatan penurunan stunting telah diluncurkan oleh Kantor Satwapres/TNP2K sebagai bagian tak terpisahkan dari program *Nutrition Investment in Early Years (INEY)* dan *Global Financing Facilities (GFF)* yang didanai oleh World Bank. Adapun tujuan umum dari StraNas adalah untuk mempercepat upaya pencegahan dan penurunan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Tujuan umum tersebut akan dicapai melalui lima tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Memastikan pencegahan *stunting* menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan
- b. Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah *stunting*
- c. Memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa
- d. Meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan
- e. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.

Strategi Nasional percepatan pencegahan stunting disusun melalui proses penilaian dan diagnosis pencegahan *stunting*, termasuk identifikasi prioritas kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada kelompok ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 HPK.

Strategi Nasional disusun agar semua pihak di berbagai tingkatan dapat bekerja sama dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan penurunan stunting. Penyusunan StraNas melibatkan berbagai pihak terkait, yaitu Kementerian/Lembaga, akademisi dan organisasi profesi, organisasi masyarakat madani, serta dunia usaha. Dalam penyusunannya, StraNas Stunting juga memperhatikan keberhasilan negara-negara lain dalam pencegahan stunting dan memastikan adanya keberpihakan pada kesetaraan gender dan disabilitas.

Strategi Nasional percepatan pencegahan stunting terdiri dari lima pilar, yaitu: 1) Komitmen dan visi kepemimpinan; 2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Konvergensi program pusat, daerah, dan desa; 4) ketahanan pangan dan gizi; dan 5) Pemantauan dan evaluasi. Strategi ini diselenggarakan di semua tingkatan pemerintah dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah yang terkait dan institusi non-pemerintah, seperti swasta, masyarakat madani, dan komunitas. Strategi ini digunakan untuk menyoar kelompok prioritas rumah tangga 1.000 HPK dan masyarakat umum di lokasi prioritas.

BAB III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

1. Permasalahan gizi, khususnya stunting, telah menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian utama Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Hal ini telah mendorong peningkatan integrasi dan koordinasi lintas sektor, baik Pemerintah maupun Non-Pemerintah untuk mendukung upaya percepatan perbaikan gizi termasuk stunting.
2. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi telah memiliki Peta Jalan Tahun 2017-2019 sebagai pedoman dalam percepatan perbaikan gizi. Agenda Sekretariat Gernas-PPG telah terlaksana dengan baik seperti pengembangan strategi advokasi dan perubahan perilaku, penguatan koordinasi lintas sektor, implementasi intervensi gizi terintegrasi, serta pengembangan pangkalan data dan *knowledge platform*.
3. Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi telah meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat secara umum tentang permasalahan kesehatan dan gizi serta berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan
4. Rencana Aksi Nasional/Daerah Pangan dan Gizi (RAN/D-PG) merupakan bagian dari kerangka aksi yang perlu dilakukan dalam percepatan perbaikan gizi dengan pendekatan multisektor. Hingga Desember 2018, sebanyak 29 provinsi telah menyusun RAD-PG dan 21 provinsi telah menindaklanjutinya dalam Peraturan Gubernur.

3.2. Rekomendasi

1. Memperkuat advokasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk dapat memprioritaskan perencanaan dan pelaksanaan upaya percepatan perbaikan gizi di Indonesia.
2. Memperluas jaringan kemitraan dengan berbagai sektor Non-Pemerintah seperti organisasi masyarakat madani, dunia usaha, akademisi dan organisasi profesi, dan

3. Melakukan revisi nomenklatur Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam Perpres 42/2013 tentang Gernas Percepatan Perbaikan Gizi, penguatan kelompok kerja, dan melakukan pelaporan kegiatan percepatan perbaikan gizi secara rutin.
4. Finalisasi dokumen *conflict of interest* sebagai pedoman dalam mengelola dan mencegah konflik yang dimungkinkan terjadi antara pemangku kepentingan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
5. Melakukan pendampingan kepada daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan/ intervensi gizi spesifik maupun sensitif yang berperan pada upaya percepatan perbaikan gizi.
6. Melakukan *budget tracking* secara berkesinambungan untuk menganalisis jumlah anggaran dan pengeluaran keuangan dalam bidang gizi spesifik maupun sensitif sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan dan perbaikan di tahun berikutnya.
7. Penguatan pendampingan penyusunan RAD-PG. Pemerintah Provinsi diharapkan dapat membantu dan membimbing pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RAD-PG. Pemerintah Daerah perlu melaksanakan aksi yang sesuai dengan kondisi lokal dan juga diharapkan untuk dapat melakukan inovasi-inovasi sesuai dengan kondisi setempat tetapi masih dalam kerangka pangan dan gizi nasional.

BAB IV. RENCANA KEGIATAN 2019

Lokakarya Fortifikasi Pangan

Fortifikasi pangan merupakan bagian penting dalam upaya percepatan perbaikan gizi termasuk pencegahan dan penurunan stunting. Pemerintah di bawah koordinasi Bappenas dan di dukung oleh Kementerian terkait lainnya dan mitra pembangunan akan menyelenggarakan Lokakarya Fortifikasi Pangan: Intervensi Cost Efective dalam Mengoptimalkan Penurunan Stunting. Lokakarya ini dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2019 di Jakarta dan akan di buka oleh Bapak Menteri PPN/Bappenas serta dihadiri oleh pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan dari pelaksanaan lokakarya ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fortifikasi pangan dalam rangka meningkatkan konsumsi zat gizi mikro serta merumuskan rekomendasi dalam pelaksanaan fortifikasi pangan termasuk membahas alternatif terbaru dalam memenuhi konsumsi zat gizi mikro masyarakat.

Penyelesaian Revisi Perpres 42/2013

Perumusan perubahan revisi Perpres 42/2013 telah selesai dilakukan oleh Tim Teknis untuk dapat segera disampaikan kepada Ketua Tim Pengarah Gernas-PPG, Kementerian Koordinator PMK sekaligus sebagai pemrakarsa awal. Target penyelesaian dan pengesahan perubahan Perpres 42/2013 direncanakan selambat-lambatnya pada bulan April 2019 sebelum pelaksanaan Pemilu 2019.

Selain hal di atas, Bappenas saat ini tengah menyusun Permen PPN sebagai dasar hukum pemilihan lokasi fokus pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2020-2024 termasuk juga mengatur dokumen-dokumen terkait lainnya seperti Pedoman Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi.

Penentuan Lokasi Fokus Tahun 2020-2024

Penentuan lokasi fokus intervensi penurunan stunting tahun 2020-2024 tengah di susun oleh Bappenas. Rencananya sebanyak 100 Kabupaten akan dijadikan lokasi fokus di tahun 2020. Pemilihan lokasi fokus mempertimbangkan prevalensi stunting dan tingkat kemiskinan dari masing-masing Kabupaten. Selanjutnya akan ditambahkan secara bertahap sebanyak 85 Kabupaten/Kota setiap tahunnya hingga mencapai seluruh 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia

Pelaksanaan Gernas-PPG *Annual Meeting* dan *Join Assessment* 2019

Gernas-PPG sebagai bagian dari *Global Scaling Up Movement* diharapkan dapat melakukan kegiatan *Joint Assessment* setiap tahunnya. Kegiatan ini merupakan *self-reflection* dari pelaksanaan kegiatan Gernas-PPG selama setahun dan perencanaan di tahun yang akan datang. Seluruh anggota *network* Gernas-PPG akan di undang untuk memberikan penilaian terhadap kinerja Gernas-PPG dan memberikan usulan rekomendasinya. Pada tahun 2019, rencananya kegiatan *Joint Assessment* akan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2019 dan merupakan rangkaian kegiatan pelaksanaan *Gernas-PPG Annual Meeting* yang akan diselenggarakan pada bulan September 2019.

Gernas-PPG Annual Meeting merupakan ajang tukar-menukar informasi dan praktik-praktik baik tentang upaya percepatan perbaikan gizi dari seluruh anggota Gernas-PPG termasuk pemerintah, organisasi masyarakat madani, akademisi dan organisasi profesi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan media. *Marketplace* akan dipersiapkan untuk menampilkan berbagai informasi dan inovasi kreatif dari masing-masing anggota sebagai media informasi dan pembelajaran.

Pelaksanaan SUN *Global Gathering* 2019

Indonesia terpilih sebagai salah satu negara kandidat untuk menyelenggarakan *SUN Global Gathering* 2019. Indonesia berhasil dan mampu menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan upaya percepatan perbaikan gizi termasuk penurunan stunting. Indonesia dapat dijadikan contoh baik bagi negara lain dalam hal koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan dan gizi.

Pada awal bulan Maret 2019, utusan dari *SUN Secretariat Global* akan berkunjung ke Jakarta untuk berdiskusi lebih lanjut tentang kesiapan negara Indonesia sebagai tuan rumah *SUN Global Gathering* yang akan dilaksanakan pada awal bulan Desember 2019 di Jakarta. Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Luar Negeri di minta untuk memimpin persiapan penyelenggaraan acara tahunan ini.

Penyelesaian *Dashboard* Data Terpadu

Bappenas bekerja sama dengan SatWapres/TNP2K untuk membuat kerangka pemantauan dan evaluasi intervensi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Bappenas bertanggung jawab dalam pembuatan *dashboard* data terpadu yang digunakan sebagai alat pemantauan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan capaian intervensi di masing-masing Kabupaten/Kota. *Dashboard* data terpadu percepatan perbaikan gizi diharapkan dapat diselesaikan paling lambat pada pertengahan tahun 2019.

Penandaan dan Pelacakan Anggaran Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi

Pemetaan dan perhitungan alokasi anggaran *output* K/L TA 2019 yang mendukung percepatan penurunan *stunting* dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 1) intervensi gizi spesifik, (2) intervensi gizi sensitif, dan (3) pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis. Berdasarkan analisis, dari Rp 28,99 Triliun anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan terkait penurunan stunting, porsi anggaran terbesar ada pada intervensi sensitif sebesar Rp 24,31 Triliun diikuti dengan intervensi spesifik sebesar Rp 3,66 Triliun dan *output* yang terkait pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis sebesar Rp 1,03 Triliun. Rincian anggaran dapat di lihat pada gambar 4.1. di bawah ini:

dalam ribu rupiah

No	Kementerian/ Lembaga	Analisis Lanjut Alokasi Anggaran Output Yang Mendukung Penurunan Stunting			
		Intervensi Spesifik	Intervensi Sensitif	Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis	Total
1	Kemendagri	-	-	27.953.831	27.953.831
2	Kementan	-	280.400.000	14.711.000	295.111.000
3	Kemenperin	-	1.250.000	-	1.250.000
4	Kemendikbud	-	37.938.181	453.897	38.392.078
5	Kemenkes	3.656.222.103	2.440.531.756	376.631.647	6.473.385.506
6	Kemenag	-	10.211.239	-	10.211.239
7	Kemensos	-	16.971.722.400	39.541.133	17.011.263.533
8	KKP	-	32.212.000	-	32.212.000
9	Kemen PUPR	-	4.378.129.339	345.805.855	4.723.935.194
10	Kemenko PMK	-	-	800.000	800.000
11	Kemen PPPA	-	1.600.000	-	1.600.000
12	BPS	-	-	208.822.859	208.822.859
13	Kemen PPN/ Bappenas	-	-	1.000.000	1.000.000
14	Kemenkominfo	-	25.000.000	-	25.000.000
15	BPOM	-	61.798.922	-	61.798.922
16	Kemendes PDTT	-	-	5.236.305	5.236.305
17	BKKBN	-	65.237.391	-	65.237.391
18	BATAN	-	-	13.827.260	13.827.260
	Total	3.656.222.103	24.306.031.228	1.034.783.787	28.997.037.118

Gambar 4.1. Alokasi Anggaran pada Output K/L yang Mendukung Stunting Tahun 2019

BAB V. PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas-PPG) memerlukan kerja sama lintas Kementerian/Lembaga dan Non-Pemerintah seperti dunia usaha, organisasi masyarakat madani, akademisi dan organisasi profesi, media, dan mitra pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar K/L dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi. Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, dan pemantauan kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian target percepatan perbaikan gizi di Indonesia.

Peningkatan advokasi kepada berbagai pemangku kepentingan harus terus dilaksanakan untuk keberlangsungan pelaksanaan program/kegiatan percepatan perbaikan gizi. Kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan/program perbaikan gizi baik spesifik maupun sensitif masih perlu diperkuat sebagai pembelajaran dan perbaikan perencanaan di masa yang akan datang.

Laporan ini tentunya belum mencapai tingkat sempurna, akan tetapi identifikasi terhadap hasil, tantangan, kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memberikan masukan yang sangat berarti dalam keberhasilan percepatan perbaikan gizi.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Jejaring Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Pemerintah	Mitra Pembangunan & UN System
1. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. UNICEF
2. Kementerian Dalam Negeri	2. World Bank
3. Kementerian Kesehatan	3. ADB
4. Kementerian PPN/Bappenas	4. DFAT
5. Kementerian Pertanian	5. FAO
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan	6. GIZ
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	7. MCC
8. Kementerian Perindustrian	8. USAID
9. Kementerian Perdagangan	9. WFP
10. Kementerian Sosial	10. WHO
11. Kementerian Agama	11. IFAD
12. Kementerian Komunikasi dan Informatika	12. Government of Canada
13. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13. European Union
14. Sekretaris Kabinet	14. Government of Netherland
15. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)	
16. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	
17. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	

Dunia Usaha	Organisasi Masyarakat Madani
1. PT Indofood Sukses Makmur	1. Helen Keller International
2. Cargill	2. Perdhaki (Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia)
3. Nutrifood	3. CISDI - PENCERAH NUSANTARA
4. BNI	4. Perkumpulan Indonesia Berseru
5. APPNIA (Asosiasi Perusahaan Produk Bernutrisi untuk Ibu dan Anak)	5. Fopkia (Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak) Serang
6. Unilever Indonesia	6. Micronutrient Initiative/Nutrition International
7. GAPMMI (Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia)	7. ADS/PIB
8. PT Otsuka	8. Save The Children/Yayasan Sayangi Tunas Cilik
9. DSM	9. World Vision Indonesia/Wahana Visi Indonesia
10. Midi Utama Indonesia	10. Aisiyah Muhammadiyah
11. Ewindo-East West Indonesia	11. YOP
12. Astra Internasional	12. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
13. Kalbe Group	13. Childfund Indonesia
14. BASF Indonesia	14. GAIN
15. Bayer Indonesia	15. Pelkesi
16. Mondelez Indonesia	16. Yayasan Pembangunan Citra Insan Indonesia (YPCII)
17. PT Phapros	17. Fatayat NU
18. Danone	18. Selasi (Sentra Laktasi)
19. Bank Danamon	19. Plan International Indonesia

20. Ajinomoto	20. ACF
21. Merck	21. Walubi
22. PT Pertamina (Persero)	22. Ikatan Konselor Menyusui Indonesia
23. Bank Mandiri	23. Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI)
24. Metro TV	24. Pokja IV Tim Penggerak PKK
25. PT Philips	25. KFI
26. KADIN Indonesia (Kamar Dagang dan Industri Indonesia)	26. Ayah-ASI Indonesia
27. Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI)	27. Aliansi Jurnalis Independen
28. PT Panasonic	

Perguruan Tinggi		Organisasi Profesi	
1.	FKM UI	1.	PDGKI (Persatuan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia)
2.	SEAMEO-RECFON	2.	PDGMI (Perhimpunan Dokter Gizi Medik)
3.	FEMA IPB	3.	Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia)
4.	FK UGM	4.	Pergizi Pangan
5.	FK Undip	5.	IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia)
6.	FKM Unair	6.	IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia)
7.	FKM dan FK Unhas	7.	POGI (Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia)
8.	FIKES UEU Jakarta	8.	Asosiasi Dietisien Indonesia
9.	FIKES Universitas Muhammadiyah Jakarta	9.	AIPGI (Asosiasi Institusi Pendidikan Gizi Indonesia)
10.	Poltekkes Kemenkes II Jakarta	10.	IBI (Ikatan Bidan Indonesia)
11.	Poltekkes Bandung	11.	PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia)
12.	Poltekkes Semarang		
13.	Poltekkes Jogjakarta		

Lampiran 2

Kegiatan dan Kemajuan Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi 2017-2018

Agenda	Kegiatan	Deskripsi
Agenda 1: Advokasi, Kampanye, Sosialisasi, dan KIE Perubahan perilaku	<i>SUN Global Visit</i>	<p>Mrs. Gerda Verburg selaku Koordinator <i>SUN Movement Global</i> sekaligus Asisten Sekjen PBB, mengunjungi Indonesia pada tanggal 22-23 Februari 2017 dalam rangka advokasi pelaksanaan percepatan perbaikan gizi di Indonesia dengan pejabat tinggi negara serta pemangku kepentingan terkait, yaitu (1) Menteri Keuangan; (2) Menteri PPN/ Kepala Bappenas; (3) Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan; (4) <i>Deputy Secretary General of ASEAN</i>; (5) <i>Dutch Ambassador</i>; (6) <i>Team Leader</i> Sekretariat Nasional SDGs; (7) <i>SUN Business Network</i>; (8) Mitra Pembangunan dan <i>UN System</i>; (9) <i>SUN CSO Network</i>; serta (10) <i>Field Visit</i> ke Pabrik Indolakto (Indofood Group)</p>
	Pengembangan Strategi Perubahan Perilaku	<p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan Agenda 1 Peta Jalan Sekretariat Gernas PPG, Bappenas bekerja sama dengan Unicef, World Bank, dan Alive & Thrive sedang mengembangkan strategi perubahan perilaku di tingkat nasional dan daerah</p>
	<i>Exchanging Experiences on Stunting Reduction to Peru</i>	<p>Sebagai salah satu bentuk advokasi kepada pejabat tinggi negara, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Sosial, dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diundang oleh <i>World Bank</i> untuk menghadiri Acara <i>Exchanging Experiences on Budgeting and Child Nutrition</i> yang telah dilaksanakan pada tanggal 24-28 April 2017 di Peru. Pada kesempatan tersebut telah dilakukan tukar pengalaman khususnya mengenai keberhasilan Peru dalam mengatasi permasalahan gizi, utamanya masalah <i>stunting</i> melalui pendekatan multisektoral.</p>
	<i>Workshop</i> Advokasi Gizi	<p>Bappenas bekerja sama dengan Unicef menyelenggarakan <i>Workshop</i> Strategi Advokasi Gizi pada tanggal 12 Oktober 2017 yang mengundang perwakilan Pemerintah, Mitra Pembangunan, Pakar, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Dunia Usaha, serta Organisasi Masyarakat Madani. Dalam <i>workshop</i> ini, Alive & Thrive, yang juga merupakan mitra Bappenas dalam mengembangkan strategi KIE perubahan perilaku, memaparkan <i>framework</i> yang digunakan dalam mengembangkan strategi advokasi, sosialisasi, dan KIE perubahan perilaku di beberapa negara seperti Bangladesh, Ethiopia, dan Vietnam. Dalam <i>workshop</i> ini juga dipaparkan mengenai konsep “Isi Piringku” oleh Kementerian Kesehatan, yang nantinya akan digunakan sebagai strategi komunikasi kepada masyarakat. Konten “Isi Piringku” akan dikembangkan sesuai jumlah 34 provinsi yang akan menyesuaikan komposisi makanan lokal</p>

Agenda	Kegiatan	Deskripsi
	Rembuk <i>Stunting</i> (<i>Boot Camp</i>) Tahap 1	Bappenas bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Mitra Pembangunan (World Bank, UNICEF, dan MCA-I) telah menyelenggarakan kegiatan Rembuk <i>Stunting</i> Tahap 1 pada tanggal 27 – 30 November 2017. Tujuan pelaksanaan kegiatan Rembuk <i>Stunting</i> adalah untuk meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan kunci di daerah dalam penurunan <i>stunting</i> serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring & evaluasi, serta advokasi, sosialisasi, dan komunikasi interpersonal. Peserta Rembuk <i>Stunting</i> Tahap 1 terdiri dari perwakilan 7 provinsi (Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Nusa Tenggara Barat) dan 8 kabupaten (Klaten, Kulon Progo, Nganjuk, Banggai, Polewali Mandar, Lombok Barat, Sumbawa, serta Maluku Tengah) prioritas penurunan <i>stunting</i> di tahun 2017
	<i>Learning Visit on Stunting Reduction to Vietnam</i>	Sebagai salah satu bentuk advokasi pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat Gernas Percepatan Perbaikan Gizi Bappenas, Perwakilan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 4 kabupaten prioritas <i>stunting</i> yaitu Nganjuk (Jatim), Kulon Progo (DIY), Banggai (Sulteng), dan Lombok Barat (NTB) serta 9 kabupaten lokasi Kampanye Gizi Nasional/PKGBM MCA Indonesia yang terdiri dari Musi Banyu Asin (Sumsel), Banyu Asin (Sumsel), Landak (Kalbar), Kapuas Hulu (Kalbar), Sintang (Kalbar), Kapuas (Kalteng), Katingan (Kalteng), Gunung Mas (Kalteng), dan Pulang Pisau (Kalteng), dengan didukung oleh MCA Indonesia dan IMA World Health, telah melakukan <i>Learning Visit on Stunting Reduction Achievements & Strategies</i> pada tanggal 20-24 November 2017 di Vietnam. Pada kesempatan tersebut telah dilakukan tukar pengalaman khususnya mengenai keberhasilan Vietnam dalam mengatasi permasalahan gizi, utamanya masalah <i>stunting</i> melalui pendekatan multisectoral
Agenda 2: Penguatan koordinasi lintas sektor	Penyusunan RAN-PG dan RAD-PG	Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) yang ditetapkan pada 18 Agustus 2017, maka dilakukan penyesuaian dengan RAN-PG dengan menyusun RAN-PG 2017-2019 yang di dalamnya melibatkan 14 Kementerian/Lembaga. Hingga Desember 2017, dilaporkan sebanyak 25 Provinsi yang telah menyelesaikan penyusunan RAD-PG dan juga telah direview oleh Bappenas serta 14 provinsi di antaranya telah menetapkannya ke dalam Peraturan Gubernur.
	<i>SUN CSO Coalition Workshop (South East &</i>	Pada tanggal 11-12 Januari 2017, Global SUN CSN berkoordinasi dengan Sekretariat Gernas PPG telah mengadakan <i>Experience Share and Regional Coordination Workshop (South-East and South Asia)</i> di Jakarta

Agenda	Kegiatan	Deskripsi
	<i>South Asia Region)</i>	yang didukung oleh Save the Children UK sebagai sekretariat Global SUN CSN dan mitranya Yayasan Sayangi Tunas Cilik di Indonesia. Workshop ini mengundang perwakilan pemerintah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi profesi, media nasional, serta perwakilan dari SUN CSN dari Pakistan, Nepal, Bangladesh, Kamboja, dan Myanmar.
	<i>Joint-Assessment Workshop</i>	<i>The 2017-2018 Joint-Assessment Exercise</i> merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap tahun untuk mengukur komitmen dan pencapaian 4 strategi pelaksanaan <i>SUN Movement Strategy & Roadmap 2016-2020</i> . Indonesia menyelenggarakan Workshop Joint-Assessment pada tanggal 7 Juni 2017 di Jakarta. Kegiatan ini mengundang seluruh perwakilan pemangku kepentingan yang tergabung dalam SUN Movement Indonesia/ Gernas PPG yang terdiri dari Pemerintah, Mitra Pembangunan, Dunia Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil, Akademia, dan Organisasi Profesi.
	Kajian Kapasitas Kelembagaan di Bidang Gizi (<i>Institutional Capacity Assessment on Nutrition/ICAN</i>)	Bappenas dan Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Unicef dan LPEM FEB UI melakukan kajian kapasitas kelembagaan di bidang gizi yang bertujuan untuk mengkaji kapasitas kelembagaan di tingkat provinsi dan kabupaten yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan program gizi melalui (1) pendekatan multi-sektor untuk mengatasi kekurangan gizi di tingkat provinsi dan kabupaten, serta (2) layanan gizi spesifik di fasilitas kesehatan dan di masyarakat.
	Diseminasi <i>Investment on Nutrition</i>	Pada tanggal 8 Agustus 2017, Bappenas bekerja sama dengan Unicef menyelenggarakan Diseminasi <i>Investment on Nutrition</i> yang memaparkan hasil penelitian dari Dylan Walters (World Bank), khususnya terkait <i>stunting</i> , <i>wasting</i> , anemia, dan ASI eksklusif. Diseminasi ini turut mengundang perwakilan Pemerintah, Mitra Pembangunan, Organisasi Masyarakat Madani, Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, serta Pakar.
	Pertemuan Nasional Sistem Pangan dan Gizi	Kementerian PPN/ Bappenas bekerja sama dengan FAO menyelenggarakan “Pertemuan Nasional Membahas Sistem Pangan dan Gizi” pada tanggal 7 November 2017. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memperoleh masukan dari Kementerian/Lembaga guna meningkatkan efektivitas pemanfaatan sistem pangan dan gizi dalam penurunan <i>stunting</i> . Pertemuan ini mengundang perwakilan Pemerintah Pusat, Perwakilan Daerah, Perguruan Tinggi, Pakar, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, serta Mitra Pembangunan & <i>UN system</i> .
	<i>SUN Global Gathering</i>	Sebagai salah satu negara anggota <i>SUN Movement</i> , Indonesia mendapatkan kesempatan untuk ikut serta dalam SUN Global Gathering yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2017 di Abidjan, Pantai Gading, Afrika. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 1000 orang peserta yang terdiri dari: (1) perwakilan sekitar 60

Agenda	Kegiatan	Deskripsi
		negara yang terdiri dari unsur pemerintah, <i>civil society</i> , akademisi, media, dan bisnis; (2) perwakilan badan PBB (Unicef, WHO, FAO); serta (3) lembaga <i>donor/aid global</i> . Pada acara tersebut, delegasi Indonesia yang hadir terdiri dari 5 orang peserta, yaitu 2 peserta dari Bappenas, 2 peserta dari Kemenko Perekonomian, dan 1 peserta dari Unicef Indonesia. Secara khusus, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Bappenas menjadi pembicara di dalam sesi panel dengan tema praktik pelaksanaan <i>Monitoring, Evaluation, Accountability, and Learning (MEAL) system</i> .
Agenda 3: Pengembangan Program Gizi Spesifik dan Sensitif yang terbukti efektif	Workshop Diseminasi Review Program Konsumsi Garam Beryodium untuk Semua (KGBS)	Untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi terkini kebijakan fortifikasi garam di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, melalui Sekretariat Gernas-PPG, bekerja sama dengan <i>Micronutrient Initiative (MI)</i> telah menyelenggarakan <i>workshop</i> diseminasi <i>review</i> program Konsumsi Garam Beryodium untuk Semua (KGBS) pada tanggal 23 Februari 2017. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta Pemerintah Daerah.
	Intervensi Terintegrasi	Bappenas, yang berperan dalam perencanaan pembangunan, melakukan koordinasi dengan berbagai K/L dan juga mitra lainnya melalui Sekretariat Gernas-PPG untuk mengembangkan intervensi gizi terintegrasi. "Intervensi Gizi Terintegrasi" merupakan gabungan kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan didukung oleh manajemen serta <i>leadership</i> yang baik dari lintas sektor.
Agenda 4: Membangun pangkalan data percepatan perbaikan gizi	Pengembangan <i>Database</i> dan <i>Knowledge Platform (Website)</i>	Sekretariat Gernas-PPG bekerja sama dengan UNICEF, World Bank, dan TNP2K sedang mempersiapkan alur data dan informasi, <i>hardware/software</i> , identifikasi data dan informasi yang diperlukan untuk database, serta pembuatan website. Pangkalan data akan digunakan sebagai salah satu media <i>monitoring</i> dan evaluasi serta <i>surveillance</i> pelaksanaan program intervensi gizi terintegrasi. Sedangkan website akan digunakan sebagai sarana berbagi informasi dan pembelajaran terkait dengan pelaksanaan dan kemajuan dari intervensi gizi terintegrasi.

Lampiran 3

Kegiatan dari Masing-Masing Mitra *SUN Network* Indonesia 2017-2018

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
Pemerintah					
1	Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan	Advokasi Sekda tentang 1000 HPK	Nasional	Pemerintah daerah	Peningkatan komitmen dari pemerintah daerah tentang 1000 HPK
		Koordinasi antar K/L dalam Gernas-PPG	Pemerintah Pusat	K/L	Peningkatan komitmen dan kualitas pelaksanaan Gernas-PP di tingkat pusat
2.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Koordinasi lintas sektor untuk advokasi proyek prioritas penurunan stunting	Nasional	Kementerian dan lembaga Mitra lainnya	Koordinasi kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan tentang intervensi gizi terintegrasi
		Penyusunan Rencana Aksi Nasional/Daerah Pangan dan Gizi (RAN/RAD-PG)	Nasional	Pemerintah daerah	21 Provinsi (83,3%) telah melaporkan dokumen Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) dan delapan provinsi di antaranya telah menetapkan RAD-PG ke dalam Peraturan Gubernur
3.	Kementerian Kesehatan	Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM)	11 provinsi 64 Kabupaten	Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat, penguatan pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas petugas di daerah, dan kampanye perubahan perilaku dalam pencegahan masalah kesehatan dan gizi
		Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil, dan Balita kurus	Nasional	Ibu hamil KEK dan Anak Balita kurus	Ibu hamil KEK dan anak balita kurus mendapatkan makanan tambahan selama 90 hari makan. 75.8% Ibu hamil KEK, dan 75,4% balita kurus mendapatkan makanan tambahan.
		Pemberian Tablet Tambah Darah bagi Ibu Hamil dan Remaja Putri	Nasional	Ibu hamil dan Remaja Putri	79,6% Ibu hamil mendapatkan minimal 90 tablet tambah darah selama kehamilan. 29,0% Remaja Putri mendapatkan tablet tambah darah minimal 52 tablet per tahun.
		Pemberian Vitamin A	Nasional	Balita Usia 6 - 59 bulan	94.73% balita usia 6 - 59 bulan mendapat Vitamin A
		Pemantauan Pertumbuhan Balita	Nasional	Balita	78% Balita ditimbang \geq 4 kali dalam 6 bulan terakhir
		Advokasi penggunaan	Nasional	Pemerintah daerah,	Pemerintah daerah mendapatkan sosialisasi penggunaan dana

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
		dana Dekon untuk 1000 HPK		dinas kesehatan	Dekom untuk kegiatan 1000 HPK
		Suplementasi zat besi dan asam folat untuk ibu hamil	Nasional		85% ibu hamil telah mendapatkan suplementasi zat besi dan asam folat
		Pelayanan ANC minimal 4 kali	Nasional		85% cakupan ANC minimal 4 kali
		Kelas Ibu Hamil	Nasional		91% cakupan Kelas Ibu Hamil
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Nasional	30,000 Desa atau Kelurahan	33,927 Desa atau Kelurahan
		Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Nasional		53% masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
		Imunisasi Dasar Lengkap	Nasional		91% cakupan imunisasi dasar lengkap
		<i>Success Rate</i> Tuberkulosis Paru	Nasional	Penderita BTA Positif	77,86% Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis paru BTA positif
4.	Badan Pemeriksa Obat dan Makanan	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan	Nasional	Desa aman pangan	Penerapan keamanan pangan pada area sasaran program 330 desa aman pangan
5.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Bina Keluarga Balita dan Anak (BKB)	Nasional	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi konsep kebijakan, tata laksana, dan materi BKB Review dan uji coba BKB <i>Kit</i> Visualisasi Alat Permainan Edukatif
		Tumbuh kembang anak	Nasional	Masyarakat	Meningkatkan pemahaman keluarga dalam melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
6.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Pro-GAS	NTT Banten Papua Barat Papua	563 Sekolah Dasar 99,988 siswa	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas belajar dan fisik anak Peningkatan kehadiran anak, konsentrasi belajar, dan berat badan anak
		Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	Nasional	Sekolah Dasar dan SLTP	<ul style="list-style-type: none"> Adanya fasilitas dan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan UKS di sekolah-sekolah sasaran
7.	Kementerian Agama	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan madrasah dengan UKS	Nasional	6,800 Madrasah	7,238 Madrasah dengan kegiatan UKS
		Peningkatan kualitas	Nasional	2,000,000 calon	1,837,186 calon pengantin

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
		keluarga sakinah melalui kursus pranikah		pengantin	
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pengembangan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Nasional	496,320 KK	496,320 keluarga mendapatkan program PAMSIMAS
9	Kementerian Desa	Pembinaan Posyandu di desa	Nasional	Masyarakat	Meningkatkan pemanfaatan Posyandu
		Pemanfaatan dana desa	Nasional	Masyarakat	Meningkatkan penggunaan dana desa untuk perbaikan gizi
Organisasi Masyarakat Madani					
1.	Helen Keller International	Program RANTAI <i>Rapid Action on Nutrition and Agriculture Initiative</i>	Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT	<u>Kriteria Primer:</u> Rumah Tangga Miskin, yang akan ditentukan oleh masyarakat desa dan mempunyai anak balita dan/atau Ibu hamil dan/atau Ibu menyusui	<ul style="list-style-type: none"> Adanya peningkatan rumah tangga yang mengonsumsi makanan bergizi dari sudut kualitas maupun frekuensi konsumsinya Persentase rumah tangga yang mengalami rawan pangan berkurang secara bermakna Adanya penurunan jumlah balita yang mengalami kekurangan makan jangka pendek Jumlah balita yang kebutuhan vitamin A dalam makanannya tercukupi meningkat secara bermakna
2.	Action Against Hunger	Pelatihan Gizi dan Kesehatan	6 Kecamatan di Kabupaten Kupang, NTT	Kepala Dinas Kesehatan, Staf Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan, Petugas Gizi dan Sanitarian Bidan Desa, Kader Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> Enam Puskesmas memiliki protokol PGBM 176 Balita kekurangan gizi sembuh 73 Tenaga Kesehatan terlatih (PGBM, PMBA) 656 Kader terlatih (PGBM, PMBA)
		Ketahanan Pangan Pelatihan pertanian dan distribusi bibit		Kelompok Tani	248 jiwa (60 Keluarga)

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
		Air Minum dan Kesehatan Lingkungan		Masyarakat desa dan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • 26 pompa air bersih • WC dan sarana cuci tangan di 13 sekolah • 16.216 jiwa penerima manfaat
		Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)		Masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • 15,791 orang buang air besar di jamban • 469 orang terlatih memproduksi jamban
		Promosi Kesehatan dan Penguatan Kapasitas		Masyarakat desa dan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Promosi kebersihan di 13 sekolah • Pelatihan teknis konstruksi dan pemeliharaan bagi 34 BPSPAMS
3.	Micronutrient Initiative	Mendukung program suplementasi kapsul Vitamin A	Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, NTB	Bayi Balita Tenaga Kesehatan Dinkes Kabupaten dan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • 7,1 juta balita 6-59 bulan mendapatkan 2 dosis kapsul • 100% <i>coverage</i> pada 112 Kabupaten/Kota di wilayah dampingan • 89 tenaga kesehatan telah mendapatkan pendampingan
		Mendukung program tatalaksana diare balita	NTB, Jawa Barat dan Banten	Balita Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • 92% Puskesmas yang memiliki ketersediaan Zinc dan Oralit • 1,521 tenaga kesehatan telah mendapatkan pelatihan
		Mendukung program suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil	Riau, Jawa Barat, Banten, NTB	Ibu hamil Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • 669,000 ibu hamil yang mendapatkan TTD • 68% Kabupaten/Kota yang setidaknya <20% Puskesmas yang <i>stock out</i> TTD • 113 tenaga kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan
		Demo proyek TTD remaja Putri	Cimahi dan Purwakarta	Remaja putri Tenaga Kesehatan Dinkes Kabupaten Cimahi dan Purwakarta dan Provinsi Jabar	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana baseline dan studi formatif • Tersusunnya kurikulum dan modul pelatihan • Tersusunnya strategi komunikasi dan materi KIE • Pelatihan bagi Dinas, Puskesmas, dan guru UKS • Pengadaan TTD 2.985.000 tablet

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
		Mendukung program konsumsi garam Beriodium untuk semua	Jawa Tengah, Jawa Timur dan NTB	Asosiasi Produsen Garam, Pabrik Garam, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Produsen garam skala kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> • 400ribu MT produksi garam iodium oleh produsen • 628ribu MT produksi garam iodium yang memenuhi syarat (min 30 ppm) oleh produsen • Tambahan 97 juta populasi yang mengonsumsi garam iodium • 168 Produsen garam mengikuti pelatihan • 50 petugas <i>quality control</i> (Dinas Industri dan Perdagangan)
4.	Plan International Indonesia	<i>Community Action to Improve Maternal and Child Nutrition (CAIMCN) Project</i>	Kabupaten Sikka dan Dompu	4,334 balita 5,042 ibu hamil dan menyusui	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan secara signifikan praktik pemberian ASI dan makan anak usia 6 – 23 bulan • Adanya kenaikan secara signifikan pada persentase Inisiasi Menyusui Dini dari 62.9 % menjadi 83.1 % dan persentase pemberian ASI Eksklusif pada bayi usia di bawah 6 bulan dari 74.8 % menjadi 89.7 % • Menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung praktik PMBA di tingkat masyarakat • Terjadinya penurunan prevalensi kekurangan gizi kronis yang signifikan pada anak usia 0-59 bulan, dari 41.8% menjadi 32%
5.	Yayasan Sayangi Tunas Cilik	Program Peningkatan Gizi Ibu, Bayi, dan Anak di Sidoarjo dan Malang, Jawa Timur di lapangan (Program BADUTA)	3 Kecamatan di Kabupaten Malang dan 3 Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Kader	<ul style="list-style-type: none"> • 238 konselor menyusui dilatih • 342 relawan kesehatan atau kader dan 144 petugas kesehatan termasuk bidan desa • 20 fasilitas kesehatan membuat komitmen untuk menerapkan 10 LMKM • Mendorong Tempat Kerja Publik dan Swasta untuk Mengadaptasi Dukungan Menyusui bagi Ibu yang Bekerja • Festival makanan dilakukan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti PKK, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan lain-lain untuk mempromosikan makanan pendamping ASI (MP ASI) untuk anak 6-24 bulan
6.	Nahdlatul Ulama	Pelatihan 1000 HPK bagi tokoh agama	Kabupaten Brebes Jawa Tengah	Tokoh agama dan masyarakat	400 tokoh agama ikut dalam pelatihan tersebut
7.	PP Aisyiyah	Dapur Balita Sehat Edukasi Gizi "Higiene	Yogyakarta	Bayi, balita, ibu, dan masyarakat	Target yang ingin dicapai 40 Dapur Balita Sehat di 10 pengungsian

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
		Sanitasi Makanan dan Pengolahan Makanan Sehat”			
Dunia Usaha					
1.	Indofood	Nutrition for Workforce	Jakarta, Bandung, Surabaya	Karyawan Indofood	Pengetahuan karyawan tentang Pedoman Gizi Seimbang meningkat, sehingga karyawan menyadari pentingnya makan-makanan yang lebih sehat dan juga
		Ruang Laktasi	Seluruh unit usaha		<ul style="list-style-type: none"> • Ruang laktasi di gedung Indofood • Proses pembuatan <i>policy</i> untuk ruang laktasi di seluruh unit usaha
		Revitalisasi Posyandu	Posyandu di lokasi perkebunan Indofood	206 Posyandu yang tersebar di perkebunan Indofood	<ul style="list-style-type: none"> • 152 Posyandu telah dilengkapi dengan peralatan standar Posyandu • 235 orang tenaga kesehatan telah dilatih
		Sarapan sehat	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Anak sekolah, guru, orang tua murid, dan mahasiswa dan dosen	Pendidikan Sarapan Sehat di 10 kota/kabupaten di Indonesia
		SUN Mobile Unit	Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur	Ibu hamil dan balita di Posyandu Binaan SUN Mobile Unit	716 Posyandu 18.385 bayi 0 - 12 bulan 32.937 balita 4078 ibu hamil
2.	Nutrifood	GENERATOR (Gerakan Sehat Seru di Kantor-Kantor) dan Sarasehan Nutrisi	Seluruh kantor Nutrifood	Karyawan Nutrifood	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak lebih dari 5000 karyawan telah mendapatkan edukasi mengenai nutrisi dan kesehatan • Penyediaan <i>NutriFun Canteen</i> • Adanya kegiatan <i>Forecast Your Weight Program</i> dan telah berhasil membantu 30% karyawan dalam menurunkan berat badan.
3.	PT Bayer Indonesia	Pembinaan Kader dan Posyandu	Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok	Masyarakat di sekitar pabrik Bayer melalui lima Posyandu Binaan	Sampai dengan akhir tahun 2016 terjadi peningkatan kunjungan terutama balita sebanyak 360 balita dan 299 ibu hamil.
4.	Phapros	Program SEHATI	Jawa Tengah	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas layanan Posyandu, pemantauan status

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
		"Sehatkan Keluarga dan Buah Hati"			gizi balita di Posyandu <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemahaman dan kesadaran ibu balita terhadap kesehatan dan gizi bagi anak serta kesadaran ibu hamil untuk menjaga kesehatan diri dan bayi yang dikandungnya
5.	Astra International	Pelayanan kesehatan masyarakat - Mobil Kesehatan Astra (Mokesa)	32 provinsi	83.849 pasien	Memberikan paket pelayanan kesehatan dasar kepada 83.849 masyarakat melalui pemeriksaan kesehatan dasar gratis
		Posyandu Binaan	28 provinsi	904 Posyandu	Melihat lebih detail mengenai keadaan status perkembangan gizi anak dan kesehatan lainnya
6.	Kalbe Farma	Aksi peduli tumbuh kembang anak	Nasional	Masyarakat, ibu, dan anak	288,132 orang tua 6,682 dokter umum, dokter spesialis anak dan tenaga kesehatan
Universitas, Akademia, Organisasi Profesi					
1.	Universitas Hasanudin	Penyelamatan 1000 HPK dengan pendekatan keluarga	Kota Makassar	Tenaga kesehatan	<i>Evidence Based Learning (EBL)</i> antar profesi kesehatan melalui lima kompetensi (Gizi, Kesehatan Masyarakat, Kebidanan, Kesehatan Lingkungan, dan Keperawatan)
		Percepatan Perbaikan Gizi pada 1000 HPK	Kabupaten Banggai	Tenaga kesehatan, ibu, anak, dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Nota Kesepahaman Bupati Banggai dengan Direktur Bina Gizi Kemenkes tentang Pelaksanaan Perbaikan Gizi pada 1000 HPK Dibentuk gugus tugas gerakan 1000 HPK di tingkat Kabupaten dengan Surat Keputusan Bupati Posyandu pra-konsepsi
2.	SEAMEO-REFCON	Gizi dan Kesehatan Sekolah	Kabupaten Malang	Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> Buku Pegangan dan Rencana Ajar "Gizi dan Kesehatan Remaja" untuk Guru Sekolah Menengah Pertama Buku Panduan Gizi Seimbang Remaja "ASIK" (Aktif, Sehat, pintar, Kreatif): modul untuk guru SLTA dan modul untuk siswa SLTA
3.	PERSAGI	Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)	Nasional	Tenaga kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Terlibat dalam dalam pelatihan Konselor PMBA sebagai fasilitator nasional. Analisis Isu Kehamilan Remaja di Luar Nikah Kelurahan Johar Baru, Jakarta Menyusun Modul Asuhan Gizi di Masyarakat diimplementasikan oleh seluruh tenaga gizi di Indonesia

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
Mitra Pembangunan					
1.	DFAT through Nutrition International	Micronutrient Supplementation	NTT and East Java (10 Districts each)	Pregnant mothers and children under five	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk penentu kebijakan dalam perencanaan dan anggaran (e-procurement) serta peningkatan cakupan • Pertemuan dengan pakar, perusahaan farmasi serta sektor swasta lainnya companies
2.	DFAT through MAMPU Programme	Pembuatan Model Layanan Puskesmas yang ramah ASI	6 Provinsi, 16 Kab/Kota, 48 Kecamatan dan 96 Desa	8037 Perempuan Usia Subur (PUS)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembuatan 48 Model Layanan di 16 Kab/Kota • Dinkes Kabupaten Lamongan, telah mengeluarkan Surat Dinas Kesehatan Lamongan Nomor 444/1509/413.105/2016 tentang Pemberian Sertifikat bagi Ibu Menyusui 0-6 Bulan, yang ditujukan pada Kepala UPT Puskesmas
3.	UNICEF	CMAM Modelling	Kabupaten Kupang, NTT	Pemerintah Indonesia, ibu dan anak	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rolled-out</i> protokol CMAM dan panduan pelatihan • 3,000 anak balita dipantau kondisi status gizinya dan sepertiga anak kurang gizi dapat disembuhkan
		Gizi Remaja	Kabupaten Klaten dan Lombok Barat	Pemerintah Indonesia, remaja dan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Studi kualitatif kebiasaan makan dan aktivitas fisik • Pengumpulan data dasar • <i>Landscape review on adolescent nutrition policy, plans, and programmes</i>
4.	World Food Programme	Kampanye Gizi Seimbang	Nasional	Remaja dan ibu	<i>Pre-launching stage and fund rising</i>
		<i>Nutrition sensitif social protection</i>		PKH beneficiaries	<i>Cost of the diet study completed in March 2017, On-going technical assistance</i>
		<i>Nutrition School Meal Programme</i>		<i>School children (Primary school)</i>	<i>On-going technical assistance</i>
5.	World Bank	<i>Multi-sectoral Nutrition Framework and Action Plan</i>	Nasional	<i>Government of Indonesia and Multisector stakeholders</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Advokasi pada pimpinan tertinggi tentang model penurunan stunting • Memperkuat pesan gizi melalui pelatihan berkelanjutan • Pelaksanaan <i>Quantitative Service Delivery Survey</i> • Pelaksanaan <i>Public Expenditure Tracking Survey for nutrition</i>
		<i>National Program for Community Empowerment in Rural Areas Healthy and Bright Generation (PNPM Generasi)</i>		11 provinsi 499 kabupaten, dan 600 desa	Ibu dan anak

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
		<i>Water Supply and Sanitation for Low Income Community Based Water Supply (PAMSIMAS III)</i>	Nasional	Ibu, anak, dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan sarana air bersih kepada 8 juta orang Menyediakan sarana sanitasi kepada 7,7 juta orang di 10,287 desa Lebih dari 51% target program sudah Open Defecation Free (ODF)
6.	FAO	Gizi dan Kesehatan	Kabupaten Konawe, Sulawesi Utara Kabupaten Sleman dan Lima Puluh Kota Kabupaten Minahasa	Pemerintah daerah, masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Promosi makanan pangan lokal dengan pemanfaatan pati dan pembinaan 20 kelompok tani Peningkatan usaha tani padi-ikan terpadu Pengembangan bebek-broiler dan produksi telurnya di Kabupaten Minahasa.
Kolaborasi Antar Mitra					
1.	Otsuka Indonesia dan PDGKI dan PDGMI	Gizi Anak Bangsa	Pesantren Tebu Ireng	Murid Pesantren Tebu Ireng	Sebanyak 1.858 murid pesantren mendapatkan tambahan pengetahuan peran gizi untuk remaja, gizi seimbang, pentingnya sarapan, menu makan sehat, dan pemberian tablet tambah darah
2.	Unilever dan WFP	Project Laser Beam	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT	Sekolah dan masyarakat	Sebanyak 71 sekolah telah menerima manfaat dari proyek ini dalam bentuk <i>school meals</i> , sarana air bersih dan sanitasi, kampanye perubahan perilaku
3.	Kemenko PMK, Kemkes, PDGMI, HOGSI/POGI, IDAI, IBI dan <i>Danone Ecosystem</i>	Duta 1000 HPK	Jawa Barat	Tenaga kesehatan, kader, dan ibu	Pelatihan untuk 109 Bidan senior sebagai Duta 1000 HPK. Selain itu, 1.922 bidan telah dilatih sebagai edukator, 877 kader sebagai fasilitator, dan sosialisasi untuk 30.682 ibu hamil
4.	PDGMI dan Kemendikbud	Pelatihan Dokter Kecil Mahir Gizi (DKMG)	Nasional	2,255 Sekolah Dasar di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan untuk 1,200 siswa dan 8,400 orang tua/ibu Program "Indonesia Bebas Anemia" yakni kampanye pentingnya mencegah dan menanggulangi anemia di berbagai media cetak, online, dan elektronik
5.	PERSAGI dan PT. Nestle Indonesia	Pelatihan dan workshop Pemberian Makanan Tambahan	Jabodetabek	Masyarakat	Pelatihan dan pencatatan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dengan Kurang Energi Kronis (KEK)
6.	SEAMEO RECFON	Penelitian dan	Nasional	Guru dan siswa SD,	1. Program <i>Gizi untuk Prestasi</i>

No	Organisasi	Nama Kegiatan	Lokasi	Sasaran Program	Hasil
	dan Kementerian Kesehatan	pengembangan intervensi gizi		SMP, SMA/SMK di Indonesia; masyarakat (Ibu dan anak balita); Politeknik kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • 2 buku dan rencana ajar untuk guru SMP-SMA-SMK, dan guru SD • <i>Online training</i> untuk untuk guru SMP-SMA-SMK, dan guru SD (sudah 1473 guru SD and 172 guru SMP-SMA/SMK di 20 provinsi) • Pelatihan kebun gizi sekolah bagi para guru • Pelatihan kantin sehat sekolah bagi para guru SMK <p>2. Program “Anakku sehat dan cerdas”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi pemberian PMT terhadap anak kurus di 6 Provinsi di Indonesia • Pengembangan panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal di Sambas dan Malang • Pengembangan panduan gizi seimbang berbasis pangan lokal untuk beberapa provinsi di Indonesia • Evaluasi program gizi untuk pengentasan stunting di 9 Kabupaten/Kota di Indonesia • Pelatihan pengembangan kapasitas Politeknik Kesehatan untuk mengembangkan panduan gizi seimbang pangan lokal

Lampiran 4

Kegiatan Advokasi Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

No.	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	9 Januari 2018	Pertemuan Pembahasan Rembuk Stunting & Stunting Summit
2	11 Januari 2018	Pertemuan Pembahasan Rancangan DAK Kesehatan Tahun 2018 & 2019 Tematik Stunting
3	19 Januari 2018	Pembahasan SEB MenPPN/KA Bappenas & Mendagri tentang Intervensi Terintegrasi
4	22 Januari 2018	Pembahasan agenda Stunting Summit
5	24 Januari 2018	Rapat Pembahasan Stunting Summit dengan MCA Indonesia
6	31 Januari 2018	Pertemuan Revisi Perpres Gernas 42/2013
7	7 Februari 2018	Pertemuan Eselon 1 Persiapan Stunting Summit
8	7 Februari 2018	Pertemuan Diskusi Pembelajaran PKGBM MCA Indonesia
9	12 Februari 2018	Pertemuan Eselon 1 Pembahasan Lokasi Prioritas Penurunan Stunting Tahun 2019
10	14 Februari 2018	Pertemuan Pembahasan Konsep Advokasi & Sosialisasi Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
11	15 Februari 2018	Pertemuan Persiapan WNPG XI Bidang 5
12	21 Februari 2018	Workshop Rekomendasi dan Pemetaan Isu Pesan Advokasi Percepatan Penurunan Stunting
13	1 Maret 2018	Pertemuan Eselon 2 terkait Stunting Summit dan Lokasi Stunting 2019
14	1 Maret 2018	Pertemuan Eselon 1 Tindak Lanjut Stunting Summit
15	20 Maret 2018	Pertemuan Koordinasi WNPG Bidang 5 (Identifikasi Pembicara)
16	20 Maret 2018	Pertemuan Persiapan Stunting Summit 2018
17	21 Maret 2018	Pertemuan Pembahasan Draf Final Buku Pedoman Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
18	26-27 Maret 2018	Rembuk Stunting Tahap 2
19	27 Maret 2018	Pertemuan Koordinasi Stunting Summit
20	28 Maret 2018	Stunting Summit
21	10 April 2018	Pembahasan Serial Kajian Pra-WNPG Bidang 5
22	11 April 2018	Rapat PforR Stunting DLI 2
23	12 April 2018	Rapat PforR Stunting DLI 4
24	16 April 2018	Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi RANPG Tahun Pilar 1

No.	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan
25	18 April 2018	Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi RANPG Tahun Pilar 2
26	19 April 2018	Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi RANPG Tahun Pilar 3
27	20 April 2018	Pertemuan Pemantauan dan Evaluasi RANPG Tahun Pilar 4
28	24 April 2018	Pertemuan Kajian Peran dan Manfaat Susu
29	26 April 2018	Rapat Pembahasan Konsep Penilaian Kinerja Daerah PforR Stunting
30	7 Mei 2018	Breakfast meeting terkait Fortifikasi Minyak Goreng
31	7 Mei 2018	Serial Workshop Kajian Akademik Pra-WNPG Bidang 5
32	15 Mei 2018	Expert Meeting HSR Gizi
33	28 Mei 2018	Diskusi Media bersama Menteri PPN/Ka Bappenas "Pencegahan Stunting"
34	31 Mei 2018	Rapat Data Gizi Masyarakat
35	31 Mei 2018	Rapat Stunting Eselon 1 Bappenas dan K/L
36	31 Mei 2018	Expert Meeting HSR Gizi
37	6 Juni 2018	Kajian Akademik Peran Industri dan Teknologi Pangan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting
38	7 Juni 2018	Kajian Akademik Peran Sosial-Budaya dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting
39	8 Juni 2018	Pertemuan Pembahasan Perhitungan Target TPB/SDGs Tujuan 2 dan 3
40	25 Juni 2018	Pertemuan Pakar dan Perumus RAN-PG
41	29 Juni 2018	Pertemuan Perumusan Makalah & Presentasi WNPG Bidang 5
42	12 Juli 2018	Pertemuan Analisis Pendanaan INEY
43	13 Juli 2018	Pertemuan Penyiapan Laporan Gernas 2017
44	13 Juli 2018	Rapat Posyandu dan Germas Hidup Sehat
45	19 Juli 2018	Pertemuan Lanjutan Data Gizi Masyarakat
46	19 Juli 2018	Pertemuan Pembahasan Pedoman Tagging INEY
47	20 Juli 2018	Pertemuan Eselon 1 Penurunan Stunting & Pra-Joint Assessment
48	27 Juli 2018	Workshop Joint-Assessment
49	31 Juli 2018	Rapat Data Susenas dan Riskesdas dengan Konsultan Bank Dunia
50	6 Agustus 2018	Rapat Persiapan Workshop Fortifikasi Minyak Goreng Sawit
51	8 Agustus 2018	FGD Expert Meeting Intervensi Efektif Penurunan Stunting

No.	Waktu Pelaksanaan	Nama Kegiatan
52	21 Agustus 2018	Pertemuan Penguatan Posyandu dalam Penurunan Stunting
53	28 Agustus 2018	Rapat Persiapan Proworkshop Fortifikasi Tepung Terigu
54	30 Agustus 2018	Rapat Persiapan Proworkshop Fortifikasi Minyak Goreng Sawit dan Garam
55	17 September 2018	Tindaklanjut Pembahasan Pedoman Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi
56	20-21 September 2018	Sosialisasi Germas dan Pemantauan & Evaluasi Terpadu RADPG Regional Tengah-Timur di Bali
57	25 September 2018	Proworkshop Fortifikasi Pangan Nasional
58	27-28 September 2018	Pertemuan Finalisasi Pedoman Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting di Kab/Kota
59	5 Oktober 2018	Pertemuan Proyeksi Target Penurunan Stunting
60	9 Oktober 2018	Pertemuan Pembahasan Stranas Stunting dengan CSO
61	18 Oktober 2018	Pertemuan Penentuan Target dan Strategi Pencapaian TPB Tujuan 2 terkait Gizi
62	25 Oktober 2018	Pertemuan SBCC dengan Kemkes, Tanoto Foundation, UNICEF, World Bank, NI
63	29 Oktober 2018	Pertemuan Tim Teknis Pedoman Tagging dengan World Bank, Bappenas, dan Kemenkeu
64	07 November 2018	Pertemuan Eselon 1 Stranas Stunting
65	07 November 2018	Pembahasan AWP GFF dengan Perwakilan SUN Network
66	09 November 2018	Pertemuan Internal Bappenas tentang AWP GFF
67	12 November 2018	Pertemuan Tim Pakar Pangan dan Gizi
68	28 November 2018	Pertemuan Pembahasan Teknis Administrasi GFF
69	1 Desember 2018	Pertemuan Pokja LSP Stunting
70	3 Desember 2018	Narasumber pada Rakornas TAPM Bidang PSD TA 2018
71	5 Desember 2018	Pertemuan Pembahasan Mekanisme ASF untuk Hibah GFF dengan Internal Bappenas & Bank Dunia
72	7 Desember 2018	Pertemuan Penyepakatan Daftar Output yang di-Tagging untuk Stunting
73	11 Desember 2018	Pertemuan Pembahasan Strategi BCC dengan Tanoto Foundation
74	14 Desember 2018	Pertemuan Konfirmasi Tagging Output Stunting K/L yang mendukung penurunan stunting
75	26 Desember 2018	Pertemuan Eselon 1 Pembahasan SUN Global Gathering

Lampiran 5

Matriks Pemantauan Kesiapan Provinsi dalam Penyusunan RAD-PG pada Tahun 2018

No	Provinsi	Komponen Kesiapan Penyusunan dan Pelaksanaan Pergub tentang RAD-PG			Keterangan
		Tim Pengarah dan Tim Teknis	Dokumen RAD-PG	Peraturan Kepala Daerah	
1	Aceh	S	S	P	RAD telah di sosialisasikan ke kabupaten/kota
2	Sumatera Utara	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
3	Riau	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
4	Kepulauan Riau	S	S	P	Dokumen RAD-PG sudah direview tim pusat
5	Sumatera Barat	S	S	P	Tahap finalisasi, belum direview tim pusat
6	Jambi	S	S	P	Dokumen RAD-PG sudah direview tim pusat
7	Bengkulu	S	P	BS	Tahap finalisasi, belum direview tim pusat
8	Sumatera Selatan	S	BS	BS	Dokumen dalam tahap penyusunan dibantu
9	Bangka Belitung	S	BS	BS	
10	Lampung	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
11	Banten	S	BS	BS	
12	DKI Jakarta	S	BS	BS	
13	Jawa Barat	S	P	BS	
14	Jawa Tengah	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
15	DI Yogyakarta	S	S	P	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
16	Jawa Timur	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
17	Bali	S	S	P	Dokumen RAD-PG sudah direview tim pusat
18	Nusa Tenggara Barat	S	S	BS	Sudah direview tim pusat dan dalam tahap finalisasi
19	Nusa Tenggara Timur	S	S	P	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
20	Kalimantan Utara	S	S	P	Dokumen RAD-PG sudah direview tim pusat
21	Kalimantan Barat	S	S	P	Dokumen RAD-PG sudah direview tim pusat
22	Kalimantan Tengah	S	S	P	Dokumen RAD-PG sudah direview tim pusat
23	Kalimantan Timur	S	S	P	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
24	Kalimantan Selatan	S	P	BS	Proses penyusunan RAD-PG
25	Sulawesi Utara	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
26	Gorontalo	S	S	P	Tahap finalisasi, belum direview tim pusat
27	Sulawesi Barat	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG

28	Sulawesi Tengah	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
29	Sulawesi Selatan	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
30	Sulawesi Tenggara	S	S	P	Dokumen RAD-PG sudah direview tim pusat
31	Maluku Utara	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
32	Maluku	S	S	S	Tahap Pelaksanaan Pergub RAD-PG
33	Papua Barat	BS	BS	BS	
34	Papua	BS	BS	BS	

Keterangan: S = Sudah dibentuk/disusun/ditetapkan P = Dalam proses pembentukan/penyusunan/penetapan BS = Belum dibentuk/disusun/ditetapkan

Lampiran 6

Rangkaian Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan RAD-PG Bulan Januari-Desember Tahun 2018

No	Tanggal	Kegiatan
1	10/01/2018	Pembahasan Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi bersama biro hukum dan direktorat pangan dan pertanian
2	31/01/2018	Harmonisasi rancangan Perpres kebijakan strategis & rencana aksi pangan dan gizi
3	16/02/2018	Sosialisasi dan Implementasi RAD-PG Jawa Tengah di Bappeda Jateng
4	03/04/2018	Pembahasan RAD-PG Provinsi Banten
5	09/05/2018	Sosialisasi rakor dan bimtek penyusunan RAD-PG se-Kalimantan Utara
6	10/05/2018	Rapat pembahasan RPerpres tentang KSPG
7	23/05/2018	Sosialisasi RANPG multisektor dan draf RADPG Provinsi Maluku Utara
8	01/08/2018	Sosialisasi revisi RADPG Provinsi Kaltim 2014-2018 dan Pergub RAD-PG Provinsi Kaltim
9	03/08/2018	Menerima Konsultasi RAD-PG Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel
10	10/08/2018	Rakor RADPG 2017 - 2022 Provinsi Banten
11	10-11/08/2018	<i>Multistakeholder forum</i> PKGBM untuk cegah stunting di Kabupaten Gunung Mas-Kalteng
12	14-15/8/2018	<i>Multistakeholder forum</i> kampanye gizi nasional PKGBM untuk cegah stunting di Kabupaten Katingan-Kalteng
13	25/08/2018	Rapat pembentukan tim advokasi, sosialisasi, dan pendampingan RAN-PG dan RAD-PG
14	08/09/2018	Menerima konsultasi Pergub RAD-PG Provinsi Sulawesi Selatan
15	12/09/2018	<i>Multistakeholder forum</i> kampanye gizi nasional PKGBM untuk cegah stunting di Kabupaten Pulang Pisau
16	13-14/09/2018	Sosialisasi dan Bimtek penyusunan RAD-PG Provinsi Sumatera Selatan
17	19-20/09/2018	Sosialisasi dan Bimtek penyusunan RAD-PG Provinsi Kalimantan Barat
18	19-20/09/2018	Sosialisasi dan diskusi pendahuluan penyusunan RAD-PG Provinsi Jambi Tahun 2016-2021
19	26-27/09/2018	Rakor pemantauan dan evaluasi Pergub RAD-PG Provinsi Sulawesi Barat 2017
20	29/09/2018	Menerima konsultasi Pergub RAD-PG Provinsi Maluku
21	02/10/2018	Pertemuan koordinasi penyusunan RADPG provinsi Bali
22	10/10/2018	Pertemuan tindak lanjut Perpres No. 83 tahun 2017 tentang KSPG
23	06/10/2018	Menerima konsultasi pelaksanaan Pergub RAD-PG Provinsi Jawa Timur
24	09-10/10/2018	Sosialisasi dan Bimtek penyusunan RAD-PG Provinsi Kalimantan Tengah
25	23/10/2018	Pertemuan Pembahasan Revisi RAN-PG 2018-2019
26	25/10/2018	Rakor generasi emas NTB, "sosialisasi Perpres 83/2018 tentang KSPG
27	25/10/2018	Rapat evaluasi Pergub RAD-PG Provinsi Jawa Timur tahun 2018
28	31/10/2018	FGD penyampaian laporan akhir penyusunan dokumen RAD-PG provinsi Gorontalo
29	07/11/2018	Menerima konsultasi Pergub RAD-PG Provinsi Jawa Barat
30	09/11/2018	Pertemuan Pembahasan Revisi RANPG 2018-2019 bersama K/L

No	Tanggal	Kegiatan
31	21/11/2018	FGD draft final RAD-PG Provinsi Kalsel
32	23-24/11/2018	Workshop pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG tahun 2018 regional tengah dan timur
33	07/12/2018	Menerima konsultasi Pergub RAD-PG Provinsi Kalimantan Tengah
34	7-8/12/2018	Sosialisasi RANPG sebagai acuan dalam penyusunan RAD-PG Provinsi dan kabupaten/kota se-NTB
35	13/12/2018	Workshop pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG tahun 2018 regional barat (Sumatera dan Jawa)
36	20/12/2018	Menerima konsultasi Pergub RAD-PG Provinsi Kepulauan Riau
37	22/12/2018	Menerima konsultasi Pergub RAD-PG Provinsi Sumatera Barat